



LAPORAN PENELITIAN

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM INPRES DESA TERTINGGAL (IDT)
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN PENDUDUK MISKIN
DI KABUPATEN DATI II BANYUMAS

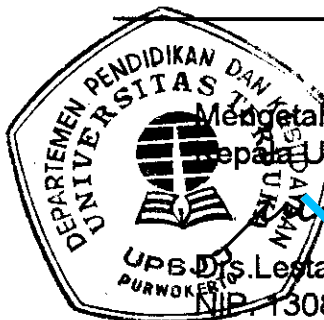
UNIVERSITAS TERBUKA

Oleh :
Dra. Sri Weningsih
Drs. Bambang Tri Harsanto, M.Si.
Drs. Bambang Widodo

**UNIVERSITAS TERBUKA
LEMBAGA PENELITIAN
PUSAT STUDI INDONESIA
1998**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN PSI - UT**

1. a. Judul Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Program Inpres
Desa Tertinggal (IDT) dan Dampaknya
Terhadap Pendapatan Penduduk Miskin di
Kabupaten Dati Il Banyumas
- b. Bidang Penelitian : Studi Kebijakan Publik
-
2. Ketua Peneliti
- a. Nama : Dra. Sri Weningsih
- b. NIP : 131787023
- c. Golongan / Pangkat : III C / Penata
- d. Jabatan : Lektor Muda
- e. Fakultas/Unit Kerja : FISIP / UPBJJ-UT Purwokerto
-
3. Anggota Peneliti
- a. Jumlah Anggota : 2 (dua) orang
- b. Nama Anggota/NIP/
Gol/Pangkat :
1. Drs.Bambang Tri H, M.Si./131657338/III C/Lektor Muda
2. Drs.Bambang Widodo /131693623/III D/Lektor Madia
-
4. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
5. Biaya Penelitian : Rp. 3.524.000,00 (Tiga juta lima ratus dua
puluh empat ribu rupiah)



Mengetahui:
Kepala UPBJJ-UT Purwokerto,

Drs. Lestanto Unggul Widodo, MS.
NIP. 130801794

Purwokerto,
Ketua Peneliti 22 OCT 1998

Dra. Sri Weningsih
NIP. 131787023

Menyetujui:
Kepala PSI-UT

DR. Tian Belawati
NIP. 131569974



Menyetujui:
Lembaga Penelitian UT

W. Simanjuntak, M.Ed., Ph.D.
NIP. 130212017

RINGKASAN

Program IDT mempunyai tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk miskin.

Pelaksanaan program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas dimulai tahun anggaran 1994 / 1995. Menurut hasil penelitian belum menunjukkan hasil yang diharapkan dari tujuan akhir program IDT tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari perbandingan rata - rata income perkapita sebelum dan sesudah menerima bantuan modal IDT yang hanya meningkatkan jumlah penduduk tidak miskin sebesar 1,33 %.

Program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme program seperti apa yang digariskan oleh pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian , dimana pembentukan pokmas yang kurang demokratis , kemampuan pendamping yang tidak sesuai dengan kegiatan , penelitian jenis usaha yang tidak tepat.

Namun demikian pelaksanaan program IDT ini dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat penerima bantuan program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Hasil temuan diatas merupakan temuan yang cukup penting dalam menentukan kebijaksanaannya , terutama mengenai pelaksanaan program IDT agar sesuai dengan aturan pemerintah pusat.

S U M M A R Y

IDT programme has purpose to overcome poverty and to improve the living standard of poor people.

IDT programme implementation in the Dati II Banyumas Regency was begun in the budget year 1994 / 1995. According to the result of reseach it has not yet indicated result that is expected from the final purpose of IDT programme mentioned. This case is proved with the result of ratio of per capita income avarage before to after receiving of IDT capital aid which only improves the number of no poor people as big as 1.33 %.

IDT programme in the Dati II Banyumas Regency is implemented not fully conforming to the programme mechanism like what is lined up by central goverment. This case is proved from result of research, where the pokmas formation is less democratic, accompaniment's ability which does not conform to the activity, examination on the type of effort that is improper.

Nonetheless implementation of this IDT programme can improve the percapita income of Inpres Desa Tertinggal (IDT) programme aid receiving society.

Above result of finding is a suffisiently important finding in determining the policy mainly regarding IDT programme implementation so that to conform to central government regulation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala bimbingan NYa sehingga penelitian yang mengambil judul : " **Evaluasi Pelaksanaan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Dampak Terhadap Penduduk Miskin di Kabupaten Dati II Banyumas** " dapat selesai sesuai waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) , dan juga bagaimana dampak dari program IDT tersebut terhadap penduduk miskin.

Dengan selesainya penelitian ini tim peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor dan Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Universitas Terbuka atas dana yang diberikan untuk kegiatan penelitian ini.
2. Kepala UPBJJ - UT Purwokerto yang telah membantu dan memberikan ijin kegiatan penelitian.
3. Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas atas ijin dan kemudahan yang diberikan dalam penelitian ini.
4. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini.

Akhirnya semoga buku laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak - pihak yang berminat membendalami masalah IDT.

Purwokerto,

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	7
B. Manfaat Penelitian	7
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kemiskinan	8
B. Faktor - Faktor Penyebab Kemiskinan	10
C. IDT Sebagai Program Pengentasan Kemiskinan	12
D. Panduan Pelaksanaan Program IDT	14
E. Hipotesis	
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	22
B. Populasi Penelitian	22
C. Teknik Pengambilan Sampel	22
D. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Teknik Analisa Data	24
F. Penentuan Model Penelitian	25

	Halaman
BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	28
B. Deskripsi Responden	35
C. Analisa Data	38
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	72
B. Rekomendasi	73
DAFTAR PUSTAKA	

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Nomor		Hal
Tabel 1	: Penduduk Banyumas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Keadaan Akhir Tahun 1996)	29
Tabel 2	: Jumlah Desa Tertinggal Menurut Kecamatan dan Status Desa di Kabupaten Banyumas Tahun 1994	30
Tabel 3	: Daftar Nama Desa Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Dati II Banyumas Tahun 1994	31
Tabel 4	: Jumlah Desa Tertinggal , Pokmas , Pendamping dan KK Miskin di Kabupaten Banyumas	33
Tabel 5	: Jenis Kegiatan IDT Yang Dipilih Pokmas di Kabupaten Banyumas	34
Tabel 6	: Usia dan Jenis Kelamin Responden	36
Tabel 7	: Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Responden	37
Tabel 8	: Jenis Kelamin dan Jumlah Tanggungan Keluarga	37
Tabel 9	: Korelasi Antar Variabel	39
Tabel 10	: Kemurnian Hubungan Antar Variabel	41
Tabel 11	: Presepsi Responden Terhadap Pemahaman Pendamping Dalam Permasalahan Pengentasan Kemiskinan	47

	Hal
Tabel 12 : Persepsi Responden Terhadap Peranan Pendamping Dalam Membantu Menghadapi Kesulitan Anggota Pokmas.....	48
Tabel 13 : Persepsi Responden Terhadap Peranan Pendamping Dalam Melakukan Kegiatan Pendampingan	49
Tabel 14 : Penentuan Keanggotaan Pokmas	53
Tabel 15 : Sikap Masyarakat Penerima IDT Terhadap Keanggotaan Pokmas Yang Ditentukan oleh Aparat Desa	54
Tabel 16 : Perkembangan Program IDT Tahun Pelaksanaan 1994/1995 Per Desember 1997	58
Tabel 17 : Perkembangan Pelaksanaan Program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas pada Tahun Anggaran 1995 / 1996 Per Desember 1997	60
Tabel 18 : Perkembangan Pelaksanaan Program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas pada Tahun Anggaran 1996 / 1997 Per Desember 1997	61
Tabel 19 : Alasan Pemilihan Jenis Usaha	63
Tabel 20 : Rata-rata Income Perkapita Penerima Program IDT Sebelum dan Sesudah Program	68
Tabel 21 : Status Penduduk Sebelum Program	68
Tabel 22 : Status Penduduk Sesudah Program	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pelaksanaan Pembangunan Nasional selama PJP I telah memberikan hasil berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan rata-rata per kapita, meningkatnya partisipasi pendidikan dasar, menurunnya angka kematian bayi serta meningkatnya angka harapan hidup.

Disamping itu kemiskinan yang semula menjadi *trade mark* negara berkembang seperti Indonesia, pada masa pemerintahan Orde Baru ini berangsur-angsur telah dapat dihapuskan. Pada tahun 1976 ada 40,08 % (54,2 juta dari 135 juta) penduduk Indonesia yang dinyatakan berada di bawah garis kemiskinan. Tahun 1987 jumlah ini menurun menjadi 17,42 % (30 juta dari 172 juta penduduk). Pada tahun 1990 jumlahnya turun lagi menjadi hanya 15,08 % (27,2 juta dari 180 juta penduduk), sedangkan data terakhir pada tahun 1993 jumlah penduduk miskin di Indonesia tinggal menjadi 13,67 % dari jumlah penduduk keseluruhan (BPS, 1995: 72).

Namun demikian ilustrasi di atas tidak cukup untuk menggambarkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah telah cukup berhasil. Hal ini disebabkan karena penampilan pertumbuhan ekonomi yang cukup meyakinkan ini ternyata tidak diikuti oleh pertumbuhan pembangunan sosial, budaya dan

politik yang seimbang (Effendi, 1990: 210). Peningkatan hasil pembangunan ternyata belum dinikmati secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya koefisien gini yang merupakan indikator pemerataan hasil pembangunan masih menunjukkan angka 0,4 di beberapa daerah (*Ibid.*). Koefisien indek gini menunjukkan tingkat ketidakmerataan hasil pembangunan. Besarnya koefisien indek gini bergerak dari angka 0 sampai angka 1. Nilai koefisien indek gini yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan bahwa tingkat ketidakmerataan hasil pembangunan semakin tinggi. Sedangkan nilai koefisien indek gini yang mendekati angka 0 menunjukkan bahwa tingkat ketidakmerataan hasil pembangunan cukup rendah. Dengan kata lain suatu negara yang memiliki nilai koefisien indek gini yang mendekati angka 0 menunjukkan bahwa hasil pembangunan negara tersebut semakin merata dinikmati oleh semua warga negara. Apabila mengacu pada hasil temuan Effendi (1990, *Ibid.*) di atas yang menunjuk bahwa koefisien indek gini di Indonesia sebesar 0,4 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari tingginya ketidakmerataan hasil pembangunan masih cukup besar. Melihat kondisi yang demikian maka dibutuhkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih diarahkan pada kemandirian dan pemberdayaan penduduk miskin pada berbagai akses pembangunan. Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan dalam GBHN 1993 bahwa sasaran Pembangunan Jangka Panjang II adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri.

Atas dasar hal tersebut dalam Pelita VI pemerintah telah melancarkan program khusus mengenai penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No. 5 tahun 1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan, yang lebih populer disebut dengan istilah Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang terutama akan diarahkan pada 20.633 desa miskin diseluruh Indonesia yang merupakan daerah kantong kemiskinan.

Program IDT inilah yang diharapkan menjadi awal gerakan nasional bagi penanggulangan kemiskinan yang akan melibatkan seluruh bangsa untuk mengakhiri penderitaan, serta kekurangan yang berkepanjangan dari sebagian rakyat yang belum dapat ikut menikmati hasil pembangunan (Mubyarto, 1993). Melalui Program IDT, penduduk miskin di desa-desa miskin akan memperoleh bantuan modal kerja agar mereka dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan. Dana IDT dikelola di dalam kelompok sebagai modal kerja dengan cara digulirkan di antara anggota. Pelaksanaan Program IDT, yang nampak jelas berpihak pada kelompok ekonomi lemah ini diharapkan akan mampu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat.

Berdasarkan Inpres No. 5 tahun 1993, program IDT bertujuan untuk:

1. mempercepat upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dan jumlah desa/kelurahan tertinggal,
2. mengembangkan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi penduduk miskin yang bermukim di daerah pedesaan dan

perkotaan, dan

3. memperkuat mekanisme perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, untuk lebih mendorong terjadinya proses transformasi sosial ekonomi penduduk miskin kearah yang lebih maju.

Atas dasar hal tersebut penelitian ini ingin mengevaluasi apakah pelaksanaan program IDT benar-benar dapat meringankan masyarakat dari kemiskinan yang disandangnya. Namun mengingat untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan oleh inpres di atas dibutuhkan jangka waktu yang cukup panjang, maka penelitian ini berusaha mengidentifikasi keberhasilan program dengan menggunakan indikator antara yaitu **Tingkat Kenaikan Pendapatan Masyarakat**. Artinya, apabila setelah menerima program IDT penduduk miskin dapat meningkatkan penghasilannya maka program IDT tersebut dapat dianggap telah mengarah pada sasaran yang benar.

B. PERUMUSAN MASALAH

Seperti halnya pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal yang lainnya di Indonesia, pelaksanaan program IDT di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dimulai pada tahun anggaran 1994/1995, akan berlangsung selama tiga tahun anggaran dan akan berakhir pada tahun anggaran 1996/1997. Berdasarkan data yang tersedia pada Dinas PMD Kabupaten Dati II Banyumas diketahui bahwa pada tahun anggaran 1994/1995 jumlah desa tertinggal di Kabupaten Dati II Banyumas ada sebanyak 72 desa dengan jumlah penduduk miskin yang mendapat

program IDT sebanyak 17.599 KK. Pada tahun anggaran 1995/1996 ada penambahan desa tertinggal sebanyak satu desa sehingga jumlah desa tertinggal di Kabupaten Dati II Banyumas adalah 73 desa. Pada tahun yang sama juga terdapat penambahan jumlah orang miskin di desa tertinggal yang mendapat dana IDT sebanyak 6.779 KK, sehingga pada tahun anggaran 1995/1996 jumlah orang miskin yang mendapat program IDT adalah 24.378 KK.

Menurut data dari Dinas PMD yang dikutip dari Buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Program IDT Kabupaten Banyumas (1996) menunjukkan bahwa pelaksanaan program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas sampai akhir tahun anggaran 1995/1996 telah dapat mengentaskan desa tertinggal sebanyak 60 desa. Data terakhir (sampai bulan Juli 1996) menunjukkan bahwa IDT telah berhasil mengentaskan sebanyak 66 desa tertinggal. Sehingga di Kabupaten Dati II Banyumas, tersisa 7 desa tertinggal yang belum terentaskan.

Dalam tahun yang sama, dari sebanyak 24.378 KK miskin penerima program IDT yang ada di Kabupaten Dati II Banyumas telah dapat dientaskan sebanyak 17.806 KK. Artinya selama dua tahun, pelaksanaan program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas, telah dapat mengentaskan 73,04 % orang miskin menjadi tidak miskin.

Data tersebut sangat menarik untuk disimak, karena di samping memberikan gambaran terhadap keberhasilan pelaksanaan program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas, data tersebut juga menumbuhkan pertanyaan: apakah program IDT telah

benar-benar dapat menjadi *obat mujarab* bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia yang selama enam pelita telah menjadi target bagi keberhasilan pembangunan pemerintah Orde baru ?

Atas dasar uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Seberapa besar peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang disebabkan dari adanya program IDT ?

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin dalam relevansinya dengan pelaksanaan program IDT. Namun demikian, secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dampak pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin di Kabupaten Dati II Banyumas.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan Program Inpres Desa Tertinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Mengetahui peningkatan pendapatan masyarakat miskin di Kabupaten Dati II Banyumas, terutama pada kelompok masyarakat penerima bantuan dana IDT.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin di Kabupaten dati II Banyumas.
3. Dijadikan sebagai sumber acuan dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pembangunan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerah.

golongan *miskin* adalah mereka yang mempunyai tingkat pengeluaran senilai kurang dari 320 kg beras per kapita per tahun untuk penduduk pedesaan dan kurang dari 480 kg beras per kapita per tahun untuk penduduk perkotaan. *Miskin sekali* mempunyai tingkat pengeluaran senilai kurang dari 240 kg beras untuk pedesaan dan kurang dari 360 kg beras untuk daerah perkotaan. Sedang mereka yang masuk ke dalam kriteria penduduk *paling miskin* yaitu mereka yang mempunyai tingkat pengeluaran senilai kurang dari 180 kg beras untuk pedesaan dan 270 kg beras untuk daerah perkotaan.

2. Metode Bank Dunia.

Menurut Bank Dunia dalam (Kantor Statistik Jawa Tengah, 1992: *Ibid*) menggunakan dua macam perhitungan garis kemiskinan, masing-masing dengan patokan US \$ 75 dan US \$ 50 perkapita pertahun, dengan harga konstan tahun 1964. Profesor Sumitro juga menggunakan metode ini, dengan memakai tingkat pendapatan US \$ 75 dan US \$ 50, masing-masing sebagai batas kemiskinan di kota dan di desa. Untuk menggunakan metode ini pengguna harus mengkonversikan kurs US Dollar tahun 1964 ke dalam kurs Dollar pada tahun analisis, untuk kemudian dikalikan dengan kurs rata-rata US Dollar tahun tersebut ke dalam mata uang rupiah.

3. Metode BPS (Biro Pusat Statistik).

Biro Pusat Statistik (BPS, 1995) menggunakan batas ambang kecukupan pangan sebesar 2.100 kalori per kapita per

hari dan 44 gram Protein ditambah dengan minimal kebutuhan non pangan yaitu : perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan barang-barang tahan lama.

Kriteria Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) menunjukkan kebutuhan minimum selama sebulan dari pekerja dalam memenuhi kebutuhan minimumnya untuk memenuhi syarat-syarat kesehatan yang diukur menurut jumlah kalori, protein, vitamin-vitamin dan bahan-bahan mineral lainnya.

Dengan menggunakan salah satu dari ketiga ukuran tersebut, kita dapat menggolongkan apakah seseorang itu masuk kategori miskin atau tidak.

B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN

Fenomena kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Rendahnya tingkat hidup yang seringkali dijadikan alat ukur kemiskinan pada hakekatnya hanya merupakan satu mata rantai dari sejumlah faktor yang merupakan sindroma kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan karena berbagai faktor, yaitu faktor politik-ekonomi, faktor sosial-ekonomi, dan faktor ekologi (Mubyarto, 1993: 2-4).

Dari segi politik ekonomi kemiskinan dipahami sebagai produk kekuatan-kekuatan ekonomi, hubungan-hubungan produksi, serta hubungan kekuasaan yang dalam keseluruhannya mengakibatkan proses pemiskinan, misalnya nelayan yang terbelenggu oleh mata rantai eksploitasi tauke-nelayan, tunakisma yang mengalami deprivasi oleh tuan tanah, petani gurem yang terjerat hutang piutang dengan pelepas uang,

dasar tukar yang cenderung merugikan petani dan sebagainya. Hubungan produksi ini telah mengakibatkan kemiskinan bagi banyak orang dan kemewahan bagi segelintir orang (Chambers dalam Mubyarto, *ibid*). Dari segi politik ekonomi ini, kemiskinan dipandang sebagai suatu konsekuensi dari proses yang telah mendorong konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di satu pihak, dan menumbuhkan masa pinggiran di pihak lain. Dalam kondisi ini *bargaining position* si miskin dalam struktur hubungan produksi menjadi sangat lemah (*Ibid.*).

Dari segi sosial-ekonomi kemiskinan juga merupakan produk dari struktur akses yang ~~terpak~~ **saring** (*filtering-effect*)-nya mengakibatkan terhambatnya akses kaum miskin pada berbagai peluang, sumber, dan hasil pembangunan (Moel-jarto Tjokrowinoto, 1994). Persyaratan yang ditetapkan para perumus kebijakan bagi kaum miskin untuk menyediakan sarana-sarana produksi untuk dapat memanfaatkan peluang pembangunan (misalnya kolateral bagi kredit; tanah bagi proyek pertanian dan perikanan darat; ternak bagi calon penggaduh) dapat mengakibatkan dampak saring yang akan melestarikan kemiskinan itu sendiri. Hal ini bisa terjadi karena hasil pembangunan tidak menetes ke bawah tetapi tersumbat di pelapisan atas.

Dari segi ekologi, kemiskinan pedesaan diinterpretasikan sebagai fenomena fisik, teknis dan statistik (Mubyarto. *Ibid*). Pertumbuhan penduduk, kerusakan lingkungan, dan tekanan pada sumber yang tersedia merupakan penyebab dari fenomena kemiskinan. Sementara itu parasit, penyakit, kondi-

si kurang gizi, kondisi sanitasi, dan perumahan yang buruk, cenderung melestarikan kemiskinan.

Dari apa yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab kemiskinan bisa sangat bervariasi. Kemiskinan bisa merupakan produk faktor lingkungan, faktor sosio-kultural, faktor ekonomi-politik, faktor kebijaksanaan publik, dan sebagainya. Oleh karena itu, upaya menanggulangi kemiskinan tanpa memahami profil kemiskinan dan penyebab utama dari kemiskinan tersebut akan memberikan hasil yang kurang memuaskan.

Ditetapkannya IDT sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan di Indonesia didasarkan atas satu anggapan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin disebabkan karena kurangnya modal usaha yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian diharapkan dengan adanya bantuan modal usaha dari program IDT akan dapat mengatasi kesulitan awal yang menjadi penyebab kemiskinan mereka. Cara pandang yang seperti ini sebenarnya menggunakan asumsi bahwa timbulnya kemiskinan dalam masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi semata-mata. Untuk membuktikan kebenaran dari asumsi ini dapat diketahui dari hasil temuan lapangan dalam penelitian ini.

C. IDT SEBAGAI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Program IDT adalah program pengentasan kemiskinan yang dimaksudkan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan

membuka kesempatan berusaha. Secara lebih khusus program IDT dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha, dan pematapan kelembagaan usaha mereka.

Namun demikian, untuk mencapai hasil seperti yang diinginkan dibutuhkan waktu cukup lama, dan memerlukan pembinaan yang terus menerus kepada kelompok sasaran. Hal ini disebabkan program IDT merupakan program yang bersifat *bottom-up*, yang dari mulai perencanaan program sampai pada tahap evaluasi program, kelompok sasaran selalu dilibatkan, sehingga keberhasilan program sangat tergantung dari kreativitas masing-masing kelompok sasaran. Oleh karena itu, dampak program yang diharapkan dimungkinkan baru dapat terlihat dalam jangka waktu yang lama.

Atas dasar asumsi ini maka dalam melakukan evaluasi terhadap program IDT, penelitian ini menggunakan **tingkat kenaikan pendapatan** sebagai indikator dari keberhasilan program IDT. Indikator ini digunakan dengan argumen bahwa karena tujuan akhir dari program IDT adalah meningkatkan taraf hidup penduduk miskin, maka apabila program tersebut dapat menaikkan tingkat pendapatan masyarakat miskin maka dapat dikatakan bahwa program tersebut mengarah kepada dampak yang diharapkan.

D. PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM IDT

Sebagai program sektoral, pelaksanaan program IDT di Indonesia dilakukan secara serentak dan dengan prosedur kerja yang seragam. Menurut Buku Panduan Program Inpres desa Tertinggal yang diterbitkan oleh Bappenas dan Depdagri disebutkan bahwa agar pelaksanaan program IDT dapat mencapai hasil seperti apa yang diharapkan perlu dilakukan langkah-langkah manajemen program sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendampingan

Untuk mewujudkan KSM yang demokratis, dinamis dan produktif diperlukan pendamping yang bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan KSM sebagai fasilitator, komunikator, maupun dinamisator.

Pendamping dapat diambil dari petugas lapangan pada tingkat kecamatan dan berbagai departemen antara lain dari Departemen Dalam Negeri (Latihan Pembangunan Desa Terpadu atau LPDT), Departemen Pertanian (Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL dan Penyuluh Pertanian Spesialis atau PPS), Departemen Tenaga Kerja (Tenaga Kerja Sukarela Terdidik atau TKST), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan atau SP3), Departemen Sosial (Petugas Sosial Kecamatan atau PSK dan Karang Taruna), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Petugas lapangan KB atau PLKB), Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Sarjana Sukarela), serta jika perlu dari perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan,

lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya yang ada setempat.

Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari para anggota dan pengurus KSM, peningkatan kemampuan penyelenggaraan kelompok, dan peningkatan penampilan usaha anggota. Oleh karena itu pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan KSM-KSM, yaitu dengan jalan menghadiri pertemuan-pertemuan anggota dan pertemuan-pertemuan pengurus KSM maupun memberikan pelatihan-pelatihan khusus jika diperlukan. Kegiatan pendampingan dapat dilakukan oleh pendamping sendiri atau dapat juga mengundang orang/lembaga pelayanan setempat sesuai dengan kebutuhan. Khusus dalam rangka penguatan permodalan, pendamping dapat diminta untuk membantu hubungan KSM dengan bank atau badan perkreditan yang ada setempat dalam rangka pengembangan usaha KSM. melihat begitu banyaknya tugas pendampingan maka pendamping harus siap bekerja penuh waktu. Di samping itu agar tugas pendampingan dapat berlangsung efektif, maka jumlah KSM yang dibina oleh pendamping disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat dengan dibatasi sebanyak-banyaknya 10 KSM.

2. Pembentukan Pokmas/KSM

Kelompok sasaran program IDT adalah penduduk miskin yang bermukim di desa-desa yang dikategorikan miskin.

Untuk memperlancar pelaksanaan program IDT penduduk miskin diharapkan membentuk kelompok, yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dalam kaitan ini ketepatan pembentukan kelompok sangat menentukan keberhasilan program karena pembentukan kelompok sasaran program dimaksudkan agar pelayanan terhadap penduduk miskin dapat lebih efektif. Pembentukan kelompok juga dapat lebih meningkatkan interaksi, solidaritas dan kesetiakawanan diantara mereka yang senantiasa harus selalu dibangun dan dikembangkan. Kesatuan dan persatuan di dalam kelompok bermanfaat untuk mengenali permasalahan bersama serta merumuskan langkah-langkah penanganan masalah diantara mereka. Terbentuknya KSM juga memungkinkan terjadinya pengawasan pelaksanaan program IDT oleh masyarakat sendiri. Di dalam KSM diharapkan terdapat tiga ciri yang merupakan langkah proses perubahan kearah kemajuan, yaitu (1) upaya peningkatan pendapatan; (2) keterbukaan wawasan dan sikap bekerjasama dan (3) sikap demokratis-partisipatif dalam penyelenggaraan kelompok. Adanya upaya peningkatan pendapatan ditandai dengan diselenggarakannya pemupukan modal, tabungan, serta usaha produktif dari anggota. Adanya keterbukaan ditandai dengan kesediaan anggota kelompok menerima gagasan-gagasan dan kelembagaan baru. Adanya demokrasi ditandai dengan kepemimpinan kelompok yang dipilih dari dan oleh anggota dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah. Dalam pembentukan kelompok, perlu diperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

- a) Pembentukan kelompok didasarkan pada kebutuhan keluarga miskin yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
- b) Harus dihindari pembentukan kelompok yang dipaksakan oleh aparat pemerintahan termasuk aparat desa.
- c) Dalam wadah kelompok diselenggarakan kegiatan sosial ekonomi, yaitu usaha produktif, pemupukan modal dan penghimpunan tabungan sehingga memberikan manfaat secara ekonomis bagi semua anggota kelompok secara lestari dan berkelanjutan.
- d) Kelompok dapat merupakan kelompok yang sudah ada, atau dapat pula disiapkan, ditumbuhkan, dan dibina secara khusus oleh aparat desa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat perguruan tinggi atau organisasi masyarakat lainnya.

3. Pemilihan Jenis Usaha

Menurut buku panduan Program IDT, dalam menyusun rencana kegiatan program IDT yang di dalamnya termasuk menentukan pemilihan jenis usaha yang tepat bagi anggota Pokmas harus selalu di dasarkan atas prinsip-prinsip tertentu agar dapat menjamin kelangsungan usaha kelompok yang pada gilirannya akan berpengaruh pada keberhasilan peningkatan kesejahteraan anggota. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip Keterpaduan

Kegiatan dalam rangka program IDT harus terkait dan terpadu dengan kegiatan lain di desa sehingga saling mendukung dan memberikan manfaat secara optimal. Keterpaduan kegiatan ini menyangkut lokasi, dana, dan aparat pelaksana kegiatan pengadaan sarana dan prasarana.

b. Prinsip Kepercayaan

Masyarakat desa sebagai kelompok sasaran diberi kepercayaan memilih dan menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan potensi desa, masalah yang dihadapi dan kebutuhan yang harus dipecahkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Tidak ada kewajiban bagi warga desa untuk melakukan hanya satu jenis kegiatan, tetapi yang paling penting adalah bahwa kegiatan itu harus produktif dan berkelanjutan.

c. Prinsip Kebersamaan

Setiap anggota KSM mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan jenis kegiatan. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana IDT adalah kegiatan yang mampu menumbuhkan kebersamaan, kesetiakawanan, dan kemitraan diantara anggota KSM.

d. Prinsip Kemandirian

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan yang dapat mendorong kelompok sasaran untuk menolong dirinya sendiri sehingga tidak ada kemungkinan menjadi miskin kembali. Kegiatan tersebut memberikan peluang

bagi kelompok sasaran untuk dapat mengembangkan kegiatan sosial ekonomi sehingga mampu menopang hidup mereka untuk seterusnya.

e. Prinsip Ekonomis

Jenis kegiatan yang dipilih oleh kelompok sasaran harus dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka sehingga tingkat hidup kelompok sasaran harus lebih baik dari tingkat sebelumnya. Setiap kegiatan harus berdampak ekonomis bagi seluruh anggota kelompok.

f. Prinsip Berkelanjutan

Kegiatan kelompok sasaran harus dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Kegiatan yang dipilih oleh kelompok sasaran tersebut dapat berkembang dan berkesinambungan tanpa mengandalkan bantuan lagi.

Dengan enam prinsip di atas kegiatan yang dibiayai melalui program IDT diharapkan dapat menggerakkan kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin yang berada di desa-desa miskin. Sedangkan jenis kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana IDT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan prasarana fisik, karena pembangunan prasarana fisik diupayakan melalui program pembangunan yang ada,
- b. cepat menghasilkan, yaitu jarak waktu antara pengeluaran yang harus dilakukan dengan penerimaan hasil kegiatan tidak terlalu lama.

- c. mendayagunakan potensi yang ada dan dimiliki oleh desa,
- d. menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau memenuhi permintaan pasar sehingga memberikan nilai tambah,
- e. dapat memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak dan melibatkan sebanyak-banyaknya penduduk miskin,
- f. memberikan hasil dan dapat digulirkan pada seluruh warga,
- g. dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah dikenal dan dikuasai oleh masyarakat dengan memanfaatkan pengetahuan asli yang telah ada dan secara teknis dapat dan mudah dilaksanakan,
- h. disesuaikan dengan potensi dan kondisi ekologis sehingga tidak merusak kelestarian lingkungan hidup,
- i. saling mendukung dan tidak bersaing dengan kegiatan lain yang dilaksanakan melalui program pembangunan sektoral dan regional,
- j. secara sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat.

Mengacu terhadap berbagai langkah yang harus dilakukan agar pelaksanaan program IDT dapat berjalan efektif seperti apa yang tertuang dalam buku panduan di atas maka penelitian ini ingin mengevaluasi apakah pelaksanaan program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas telah dilakukan sesuai dengan manajemen program seperti yang diharapkan oleh pembuat program (Bappenas).

E. HIPOTESIS

"Apabila penentuan jenis usaha dilakukan dengan tepat, pembentukan kelompok masyarakat dilakukan secara demokratis, serta peran pendamping dapat berfungsi secara optimal maka pelaksanaan program IDT akan memberikan dampak terhadap tingkat kenaikan pendapatan penerima program IDT"

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah survey. Metode survey digunakan untuk meneliti suatu objek populasi tertentu dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner dan biasanya responden dipilih dengan menggunakan teknik sampling.

B. POPULASI PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah semua penduduk miskin di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang mendapat dana bantuan program IDT

C. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Pengambilan sampel dilakukan secara gugus bertahap dan random sampling. Gugus bertahap digunakan untuk menentukan sampel lokasi, sedangkan random sampling digunakan untuk menentukan responden yang dipilih. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas prosentase jumlah desa tertinggal di setiap kecamatan, kemudian ditetapkan tiga kategori lokasi. Pertama, kelompok kecamatan yang prosentase desa tertinggalnya tinggi. Kedua, kelompok kecamatan yang prosentase desa tertinggalnya masuk kategori sedang, dan ketiga kelompok kecamatan yang prosentase desa tertinggalnya rendah.

Untuk masing-masing kelompok kecamatan diambil beberapa desa sebagai sampel.

Sampel dari kelompok kecamatan yang prosentase desa tertinggalnya tinggi diwakili oleh Kecamatan Kembaran dengan desa Karangtengah sebagai desa sampel. Sampel dari kelompok kecamatan yang prosentase desa tertinggalnya masuk kategori sedang diwakili oleh Kecamatan Patikraja dengan desa Kedungwuluh ditetapkan sebagai desa sampel. Sampel dari kelompok kecamatan yang prosentase desa tertinggalnya rendah diwakili oleh Kecamatan Jatilawang dengan desa Gunungwetan sebagai desa sampelnya.

Dari ketiga desa sampel yang telah ditetapkan, masing-masing desa dipilih 25 orang penerima program IDT sebagai responden. Dengan demikian jumlah responden keseluruhan ada sebanyak 75 orang.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan datanya akan meliputi:

1. Observasi langsung.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui dampak yang sesungguhnya (secara empirik) dari pelaksanaan program IDT dalam masyarakat. Hasil dari observasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan recek data apakah data primer yang didapat dari para responden melalui pengisian kuesioner telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2. Wawancara mendalam (indepth interview).

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan kuesioner sebagai panduan. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif yang dapat digunakan untuk memperdalam analisis data kuantitatif melalui teknik korelasi.

3. Menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner.

Daftar pertanyaan digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif dengan jalan memberikan skor untuk tiap-tiap alternatif jawaban yang telah disediakan yang harus dijawab oleh setiap responden. Sedangkan daftar pertanyaan dapat dilihat pada halaman lampiran.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik korelasi dengan menggunakan program SPSS. Teknik korelasi digunakan untuk mengetahui apakah variabel peranan pendamping, variabel pembentukan pokmas, dan variabel pemilihan jenis usaha mempunyai hubungan dengan variabel tingkat kenaikan pendapatan penerima program IDT. Namun demikian, untuk lebih memberikan keyakinan kebenaran dari kesimpulan yang diambil, penelitian ini juga akan menggunakan metode analisis deskriptif dengan melakukan analisis deskripsi satu variabel.

F. PENENTUAN MODEL PENELITIAN

Dampak program terjadi karena suatu program kebijakan dilakukan. Dengan kata lain dampak program adalah hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan. Ada beberapa model implementasi program yang menjelaskan keterkaitan antara keberhasilan program dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Pertama, *Model Meter dan Horn*. Model ini merumuskan suatu abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Berbagai faktor yang mempengaruhi hasil suatu kebijakan tersebut antara lain; sikap pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, sumber daya, standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi dan pengukuhan aktivitas, serta karakteristik organisasi (Samodra Wibawa dkk, 1994).

Kedua, *Model Sabatier dan Mazmanian*. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu: (1) karakteristik masalah, (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, dan (3) faktor-faktor diluar peraturan (Samodra dkk, *ibid*).

Ketiga, *Model Grindle*. Menurut model ini keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh: (1) isi (content) dari kebijakan, dan (2) konteks dari kebijakan. Isi kebijakan meliputi; kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta sumber daya yang dilibatkan. Konteks kebijakan meliputi; kekuasaan, kepenting-

ngan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap (Samodra dkk. *Ibid.*).

Berdasar atas pemahaman dari ketiga model diatas, penelitian ini akan mencoba menggunakan alur pemikiran dari model yang dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian. Pemilihan dari model tersebut didasarkan atas suatu asumsi bahwa terjadinya kemiskinan dapat disebabkan karena faktor lingkungan, sosio-kultural, ekonomi, politik dan kebijakan publik (lihat tinjauan pustaka). Oleh karena itu didalam upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia semestinya tidak menganggap bahwa timbulnya kemiskinan dalam masyarakat semata-mata hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Berkaitan dengan masalah tersebut, upaya untuk melakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya program IDT peneliti mengacu pada pendapat Zabatier dan Mazmanian yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi program sangat dipengaruhi oleh (1) karakteristik masalah (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan tersebut dan (3) faktor-faktor yang ada di luar peraturan. Dari pendapat tersebut penelitian ini sekaligus dapat mengetahui, *pertama* apakah program IDT telah benar-benar dibuat sebagai program pengentasan kemiskinan yang didasarkan pada semua permasalahan yang menyebabkan munculnya kemiskinan di Indonesia, *kedua*, apakah manajemen program IDT dapat menumbuhkan pemberdayaan penduduk miskin sehingga

dapat lebih mendorong mereka untuk dapat lebih meningkatkan penghasilannya, *ketiga*, apakah masyarakat miskin telah cukup siap menerima program IDT sebagai salah satu cara untuk melepaskan dirinya dari belenggu kemiskinan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

1. Kondisi Umum

Topografis wilayah Kabupaten Dati II Banyumas diwarnai oleh beragamnya relief, baik berupa dataran rendah, dataran tinggi maupun perbukitan dengan bentuk perunungan yang landai. Kabupaten Dati II Banyumas memiliki luas 132.759,56 hektar atau sekitar 1.327,59 Km². Batas wilayah Kabupaten Dati II Banyumas meliputi:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Dati II Tegal dan Kabupaten Dati II Pemalang.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dati II Cilacap.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dati II Cilacap dan Kabupaten Dati II Brebes.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dati II Purbalingga, Kabupaten Dati II Banjarnegara dan Kabupaten Dati II Kebumen.

2. Keadaan Penduduk

Sampai dengan tahun 1996 jumlah penduduk di Kabupaten Dati II Banyumas ada sebanyak 1.436.504 jiwa. Apabila diperinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Penduduk Banyumas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Keadaan Akhir Tahun 1996)

KELOMPOK UMUR	P E N D U D U K		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0 - 4	69.671	68.713	138.384
5 - 9	89.877	85.419	175.396
10 - 14	91.167	87.011	178.178
15 - 19	79.778	75.517	155.295
20 - 24	57.215	64.362	121.577
25 - 29	56.510	62.674	119.184
30 - 34	47.769	49.472	97.241
35 - 39	45.318	44.669	89.987
40 - 44	34.300	34.403	68.703
45 - 49	32.199	34.175	66.374
50 - 54	29.477	30.785	60.262
55 - 59	24.765	26.168	50.933
60 +	56.207	58.783	114.990
JUMLAH	714.353	722.151	1.436.504

Sumber: Banyumas Dalam Angka Tahun 1996

Dari tabel di atas terlihat bahwa penduduk Kabupaten Banyumas Pada tahun 1996 berjumlah 1.436.504 jiwa. Dari jumlah tersebut jumlah penduduk yang berusia produktif, yaitu usia antara 15 tahun s.d 54 tahun ada sebanyak 778.623 jiwa atau sebesar 54,20 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penduduk usia tidak produktif yaitu usia 0 - 14 tahun ditambah usia 55 tahun ke atas ada sebanyak 657.881 jiwa atau sebesar 45,79 persen dari jumlah penduduk.

Dari kondisi tersebut terlihat bahwa beban tanggungan kerja penduduk usia produktif di Kabupaten banyumas masih cukup besar, yaitu 45,79 persen penduduk masih menjadi tanggungan dari 54,21 persen penduduk lainnya. Kondisi ini dapat berpengaruh pada kemampuan penduduk di dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini tercermin dari be-

sarnya jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten banyumas.

3. Gambaran Umum Kegiatan Pelaksanaan Program IDT

Seperti halnya dengan daerah lain, pelaksanaan Program IDT di Kabupaten Banyumas dilaksanakan mulai tahun 1994. Dari hasil penelitian pada tahun 1993 penduduk miskin yang ada di Kabupaten Dati II Banyumas berjumlah 144.231 jiwa atau sebesar 10,37 persen dari keseluruhan jumlah penduduk pada tahun 1993. Dari jumlah penduduk miskin sebanyak itu, 81.002 jiwa berada di desa tertinggal dan sebanyak 63.229 jiwa berada di desa non-tertinggal, sedangkan jumlah desa dan nama desa tertinggal yang ada di Kabupaten Dati II Banyumas pada awal pelaksanaan program IDT dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Desa Tertinggal Menurut Kecamatan dan Status Desa di Kabupaten Banyumas Tahun 1994

Kecamatan	Status Desa				Jumlah
	Miskin	%	Tidak Miskin	%	
Lumbir	3	30.00	7	70.00	10
Wangon	3	27.27	8	72.73	11
Jatilawang	1	9.09	10	90.91	11
Rawalo	0	0.00	9	100.00	9
Kebasen	3	25.00	9	75.00	12
Kemranjen	1	6.67	14	93.33	15
Sumpiuh	2	14.29	12	85.71	14
Tambak	2	16.67	10	83.33	12
Somagede	3	33.33	6	66.67	9
Kalibagor	2	16.67	10	83.33	12
Banyumas	4	33.33	8	66.67	12
Patikraja	5	38.46	8	61.54	13
Purwojati	4	40.00	6	60.00	10
Ajibarang	1	6.67	14	93.33	15
Gumelar	6	66.67	3	33.33	9
Pekuncen	3	18.75	13	81.25	16

Tabel 2. Lanjutan

Kecamatan	Status Desa				Jumlah
	Miskin	%	Tidak Miskin	%	
Cilongok	0	0.00	20	100.00	20
Karanglewas	3	23.08	10	76.92	13
Kedungbanteng	3	21.43	11	78.57	14
Baturaden	0	0.00	12	100.00	12
Sumbang	7	38.89	11	61.11	18
Kembaran	13	81.25	3	18.75	16
Sokaraja	3	16.67	15	83.33	18
Purwokerto Selatan	0	0.00	7	100.00	7
Purwokerto Barat	0	0.00	7	100.00	7
Purwokerto Timur	0	0.00	6	100.00	6
Purwokerto Utara	0	0.00	7	100.00	7
Total	72	22.25	256	77.74	328

Sumber : Bappeda Kab. Banyumas 1994

Tabel 3. Daftar Nama Desa Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Dati II Banyumas Tahun 1994

No.	Kecamatan	Rural/Urban	Nama Desa
1.	Lumbir	Rural	1. Cingebul 2. Cirahab 3. Canduk
2.	Wangon	Rural	1. Pangadegan 2. Jurang Bahas
3.	Jatilayang	Urban	1. Banteran
4.	Kebasen	Rural	1. Gunung Wetan
5.	Kemranjen	Rural	1. Karang Sari 2. Adisana 3. Tumiyang
6.	Sumpiuh	Urban	1. Nusa Mangir
7.	Tambak	Rural	1. Kradenan 1. Nusadadi
8.	Somagede	Rural	1. Watu Agung 2. Plangkapan
9.	Kalibagor	Rural	1. Tanggeran 2. Somakaton 3. Plana
10.	Banyumas	Rural	1. Srowot 2. Suro 1. Binangun 2. Karang Rau 3. Papringan 4. Pasinggangan
11.	Patikraja	Rural	1. Wlahar Kulon 2. Kd. Wuluh 3. Karang Anyar 4. Karangendep 5. Sawangan Wt.

Tabel 3. Lanjutan

No.	Kecamatan	Rural/Urban	Nama Desa
12.	Purwojati	Rural	1. Gerduren 2. Kalitapen 3. Kaliurip 4. Kaliwangi
13.	Ajibarang	Rural	1. Jingsang
14.	Gumelar	Rural	1. Kr. Kemojing 2. Paningkaban 3. Gancang 4. Cilangkap 5. Tlaga 6. Samudra
15.	Pekuncen	Rural	1. Petahunan 2. Cibangkong 3. Semedo
16.	Karanglewas	Rural	1. Kediri 2. Taman Sari 3. Sunyalangu
17.	Kedung Banteng	Rural	1. Kalikesur 2. Melung
18.	Sumbang	Urban Rural	1. Kebocoran 1. Susukan 2. Ciberem 3. Sikapat 4. Kawungcarang 5. Limpakuwus 6. Datar
19.	Kembaran	Urban Rural	1. Tambaksogra 1. Purwodadi 2. Karangtengah 3. Bojongsari 4. Sambeng Wtn. 5. Sambeng kl. 6. Purbadana 7. Karangsoka 8. Bantarwuni 9. Karangsari
		Urban	1. Pliken 2. Kembaran 3. Tambaksari Kidul 4. Linggasari
20.	Sokaraja	Urban	1. Kedondong 2. Pamijen
		Rural	1. Kalikidang

Sumber: Bappeda Kab. Banyumas 1994

Perlu dijelaskan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas jumlah desa tertinggal ada sebanyak 72 buah desa. Namun demikian satu tahun kemudian setelah dilakukan evaluasi kembali ternyata jumlah desa yang masuk kriteria daerah tertinggal bertambah satu sehingga menjadi 73 buah desa.

Sedangkan perincian jumlah pokmas, jumlah pendamping, dan jenis kegiatan yang dipilih selama tiga tahun anggaran pelaksanaan program IDT dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Desa tertinggal, Pokmas, Pendamping dan KK Miskin di Kabupaten Banyumas

Spesifikasi	T A H U N A N G G A R A N		
	1994/1995	1995/1996	1996/1997
Jumlah Desa Tertinggal	72	73	73
Jumlah Pokmas	733	715	752
Jumlah Pendamping	543	515	510
Jumlah KK Miskin	17.599	16.053	14.793
Jumlah Jiwa Tertanggung	49.050	58.527	56.031

Sumber: Dinas PMD Kab. Banyumas 1997

Tabel 5. Jenis Kegiatan IDT Yang Dipilih Pokmas di Kabupaten Banyumas

Jenis Kegiatan	T A H U N A N G G A R A N		
	1994/1995 (KK)	1995/1996 (KK)	1996/1997 (KK)
A. Pertanian			
- Kambing/Domba	9.143	8.694	8.378
- Ayam	1.993	847	216
- Itik	151	7	72
- Sapi	218	204	2.236
- Kerbau	10	1	24
- Perikanan	1.524	742	567
- Tan. Semusim	574	666	609
- Perkebunan	45	-	-
B. Perdagangan			
- Perdagangan	2.55	3.810	1.895
C. Industri			
- Industri	662	508	230
D. Jasa			
- Jasa	782	373	566
Jumlah	17.599	16.053	14.793

Sumber: Dinas PMD Kab. Banyumas 1997

Dari tabel di atas terlihat bahwa jenis kegiatan yang paling banyak dipilih oleh anggota pokmas dalam melaksanakan program IDT selama tiga tahun anggaran di Kabupaten Dati II Banyumas adalah jenis kegiatan pertanian dalam hal ini khususnya ternak kambing/domba, kemudian baru disusul jenis kegiatan perdagangan.

B. DESKRIPSI RESPONDEN

Responden penelitian ini adalah masyarakat Banyumas yang mendapat bantuan modal dari program IDT. Jumlah responden sebanyak 75 orang. Analisis deskripsi responden memiliki arti penting dalam kaitannya untuk mengetahui karakteristik dari masyarakat yang hendak diteliti. Karena dalam mengevaluasi keberhasilan program IDT tidak dapat mengabaikan karakteristik masyarakat dari penerima bantuan program tersebut.

Penelitian ini akan mendeskripsikan responden dari karakteristik jenis kelamin, usia, pendidikan, serta jumlah tanggungan. Karakteristik usia dan jenis kelamin untuk menggambarkan kemampuan produktivitas responden, karakteristik pendidikan untuk menggambarkan kemampuan dalam menyerap informasi mengenai program yang diberikan, sedangkan karakteristik jumlah tanggungan menggambarkan beban keluarga yang menjadi tanggungannya. Kesemua karakteristik tersebut ikut memberikan peranan dalam menentukan keberhasilan program IDT.

Tabel 6. Usia dan Jenis Kelamin Responden

No	Usia Responden	Jenis Kelamin		Jumlah (%)
		Laki- Laki (%)	Perempuan (%)	
1	≤ 14 tahun	-	-	-
2	15 - 55 tahun	45 (84,90)	16 (72,72)	61 (81,33)
3	≥ 56 tahun	8 (15,09)	6 (27,28)	14 (18,67)
	Jumlah	53 (100)	22 (100)	75 (100)

Sumber: Data Primer

Responden dalam penelitian ini ada sebanyak 75 orang penerima program IDT, yang terdiri dari 53 orang responden laki-laki dan 22 orang responden perempuan. Ditinjau dari segi usia, dari 75 responden yang diteliti 61 responden masuk ke dalam kategori berusia produktif, sedangkan 14 responden dapat dikategorikan berusia tidak produktif. Dari kondisi ini menunjukkan bahwa penerima program IDT sebagian terdiri atas kepala keluarga yang sebenarnya apabila ditinjau dari segi usia termasuk ke dalam kelompok usia tidak produktif.

Tabel 7. Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan Responden	Jenis Kelamin		Jumlah (%)
		Laki- Laki (%)	Perempuan (%)	
1	Tidak Sekolah	2 (3,77)	1 (4,54)	3 (4)
2	SD/SR	34 (64,15)	11 (50)	45 (60)
3	SLTP	13 (24,53)	7 (31,82)	20 (26,67)
4	SLTA	4 (7,55)	3 (13,64)	7 (9,33)
	Jumlah	53 (100)	22 (100)	75 (100)

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas juga diketahui bahwa dari 75 responden yang diteliti memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi. Tabel di atas menunjukkan bahwa 3 orang responden tidak pernah mengenyam pendidikan, 45 responden hanya berpendidikan tamat SD, 20 responden menamatkan pendidikannya sampai setingkat SLTP, dan hanya 7 responden yang menamatkan pendidikannya sampai setingkat SLTA. Dengan demikian dari tampilan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat penerima program IDT hanya memiliki tingkat pendidikan setingkat SD dan SLTP.

Tabel 8. Jenis Kelamin Responden dan Jumlah Tanggungan Keluarga

No	Jumlah Tanggungan Keluarga	Jenis Kelamin		Jumlah (%)
		Laki- Laki (%)	Perempuan (%)	
1	2 orang	4 (7,55)	6 (27,27)	10 (13,33)
2	3 orang	25 (47,17)	15 (68,18)	40 (53,33)
3	4 orang	23 (43,40)	1 (4,55)	24 (32)
4	5 orang	1 (1,88)	-	1 (1,34)
	Jumlah	53 (100)	22 (100)	75 (100)

Sumber: Data Primer

Dilihat dari beban tanggungan keluarga, dari 75 responden yang diteliti 10 responden memiliki tanggungan keluarga tidak lebih dari 2 orang, 40 responden memiliki tanggungan keluarga antara 3-4 orang, 24 responden memiliki tanggungan keluarga berkisar antara 5-6 orang, dan hanya 1 responden yang memiliki tanggungan keluarga lebih dari 7 orang. Dari tampilan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penerima program IDT memiliki rata-rata tanggungan keluarga antara 3-6 orang.

C. ANALISIS DATA

Pada bagian ini akan dicoba untuk menjawab permasalahan penelitian serta hipotesis yang sudah dikemukakan di muka. Berbagai permasalahan yang akan dijawab melalui analisis ini antara lain; apakah proses kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program IDT secara teoritis memberikan hasil seperti apa yang diinginkan; apakah di Kabupaten Dati II Banyumas proses kegiatan tersebut telah sepenuhnya dilakukan; bagaimana dampak pelaksanaan program IDT terhadap kenaikan penghasilan masyarakat miskin, dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program IDT tersebut.

1. Analisis Statistik Proses Pelaksanaan Program IDT

Menurut buku panduan pelaksanaan program IDT disebutkan bahwa keberhasilan program IDT akan dapat dicapai secara maksimal apabila dilakukan proses kegiatan pembentukan pokmas yang bersifat demokratis, adanya kegiatan pendam-

pingan, dan pemilihan jenis usaha yang tepat. Dari analisis SPSS diperoleh hasil korelasi dari ke empat variabel tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 9. Korelasi Antar Variabel

Page	4	SPSS/PC+		6/12/98
Correlations:	X1	X2	X3	Y
X1	1.0000	-.0897	.2941*	.3622**
X2	-.0897	1.0000	-.2953*	-.4155**
X3	.2941*	-.2953*	1.0000	.5088**
Y	.3622**	-.4155**	.5088**	1.0000
N of cases:	75	1-tailed Signif: * - .01 ** - .001		
" . " is printed if a coefficient cannot be computed				

Dari tabel di atas diketahui bahwa ketiga variabel bebas yaitu *peranan pendamping (X1)*, *pembentukan kelompok masyarakat (X2)*, dan *pemilihan jenis usaha (X3)* mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tergantung *tingkat kenaikan pendapatan penerima program IDT (Y)*.

Variabel *peranan pendamping* mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel *tingkat kenaikan pendapatan penerima program IDT* sebesar .3622, dengan arah hubungan positif. Artinya semakin besar manfaat pembimbingan yang dilakukan oleh pendamping kepada anggota pokmas maka akan semakin tinggi prosentase kenaikan penghasilan dari para penerima program IDT. Kedua variabel tersebut mempunyai signifikansi hubungan yang sangat kuat yaitu dari 1000 kasus yang terjadi hanya mempunyai tingkat penyimpangan sebanyak 1 kasus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan dari ke dua variabel tersebut terjadi bukan secara kebetulan.

Variabel *pembentukan kelompok masyarakat* mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel *tingkat kenaikan pendapatan penerima program IDT* sebesar $-.4155$, dengan arah hubungan negatif. Artinya semakin tidak demokratis pembentukan kelompok masyarakat maka akan semakin tinggi prosentase kenaikan penghasilan dari para penerima program IDT. Kedua variabel tersebut mempunyai signifikansi hubungan yang sangat kuat yaitu dari 1000 kasus yang terjadi hanya mempunyai tingkat penyimpangan sebanyak 1 kasus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan dari kedua variabel tersebut terjadi bukan secara kebetulan.

Variabel *pemilihan jenis usaha* mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel *tingkat kenaikan pendapatan penerima program IDT* sebesar $.5088$, dengan arah hubungan positif. Artinya semakin tepat pemilihan jenis usaha yang mengarah pada percepatan peningkatan modal usaha maka akan semakin tinggi prosentase kenaikan penghasilan dari para penerima program IDT. Kedua variabel tersebut mempunyai signifikansi hubungan yang sangat kuat yaitu dari 1000 kasus yang terjadi hanya mempunyai tingkat penyimpangan sebanyak 1 kasus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan dari kedua variabel tersebut terjadi bukan secara kebetulan.

Dari hasil korelasi parsial diketahui bahwa ada kemurnian hubungan antara variabel bebas peranan pendamping, pembentukan kelompok sasaran dan pemilihan jenis usaha dengan variabel tergantung tingkat kenaikan pendapatan penerima program IDT. Seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Kemurnian Hubungan Antar Variabel

Variable	Correl	Part	Cor	Partial	T	Sig T
X3	.508840	.325571	.383448	3.498	.0008	
X1	.362221	.221540	.271876	2.381	.0200	
X2	-.415513	-.276951	-.333021	-2.976	.0040	
(Constant)	24.294591	19.913925		1.220	.2265	

Dari tabel di atas diketahui bahwa ternyata ketiga variabel bebas mempunyai kemurnian hubungan dengan variabel tergantung. Hal ini dapat diketahui karena Value T nya .0008 untuk variabel pemilihan jenis usaha, .0200 untuk variabel peranan pendamping, dan .0040 untuk variabel pembentukan kelompok masyarakat (standar nilai signifikansi minimal yang umumnya dipakai dalam ilmu-ilmu sosial adalah .0500).

Dari tabel di atas dapat diartikan bahwa setelah hubungan variabel lain dengan variabel peranan pendamping dan variabel tingkat kenaikan pendapatan penerima program IDT dikontrol (dieliminir) maka variabel peranan pendamping mempunyai kemurnian hubungan dengan variabel tingkat kenaikan pendapatan penerima program IDT, dengan arah hubungan positif. Artinya semakin besar manfaat pembimbingan yang dilakukan oleh pendamping kepada anggota pokmas maka akan semakin tinggi prosentase kenaikan penghasilan dari para penerima program IDT.

Setelah hubungan variabel lain dengan variabel pembentukan kelompok masyarakat dan variabel tingkat kenaikan pendapatan penerima program IDT dikontrol (dieliminir) maka variabel pembentukan kelompok masyarakat mempunyai kemurnian

hubungan dengan variabel tingkat kenaikan pendapatan penerima program IDT, dengan arah hubungan negatif. Artinya semakin tidak demokratis pembentukan kelompok masyarakat maka akan semakin tinggi prosentase kenaikan penghasilan dari para penerima program IDT.

Setelah hubungan variabel lain dengan variabel pemilihan jenis usaha dan variabel tingkat kenaikan pendapatan penerima program IDT dikontrol (dieliminir) maka variabel pemilihan jenis usaha mempunyai kemurnian hubungan dengan variabel tingkat kenaikan pendapatan penerima program IDT, dengan arah hubungan positif. Artinya semakin tepat pemilihan jenis usaha yang mengarah pada percepatan peningkatan modal usaha maka akan semakin tinggi prosentase kenaikan penghasilan dari para penerima program IDT.

Mengacu pada analisis statistik di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program IDT untuk kasus di Kabupaten Dati II Banyumas apabila dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pembuat program (pemerintah pusat) secara teoritis tidak sepenuhnya memberikan hasil seperti apa yang diharapkan. Dari pengujian dengan menggunakan teknik korelasi diperoleh hasil bahwa kegiatan pembimbingan yang memberikan manfaat pada upaya membantu mengatasi kesulitan dalam melaksanakan program IDT dan pemilihan jenis usaha dari kegiatan IDT yang diarahkan pada jenis kegiatan yang dapat mempercepat kenaikan omset hasil usaha dapat memberikan dampak pada peningkatan penghasilan penerima dana IDT seperti yang di prediksi oleh pembuat program. Namun

demikian, pada kegiatan pembentukan pokmas yang disyaratkan oleh pembuat program harus bersifat demokratis, yaitu dengan mengurangi sebanyak mungkin dominasi dan pemaksaan kehendak dari aparat ternyata tidak memberikan dampak terhadap kenaikan penghasilan dari penerima program IDT seperti apa yang diharapkan oleh pembuat program. Dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa ternyata semakin besar keterlibatan aparat di dalam kegiatan pembentukan pokmas justru memberikan dampak positif pada peningkatan penghasilan dari penerima dana IDT. Oleh karena itu agar pelaksanaan program IDT dapat memberikan hasil seperti apa yang diharapkan, khususnya di Kabupaten Dati II Banyumas aparat terkait yang mempunyai kepentingan langsung terhadap keberhasilan program IDT harus berani mengambil inisiatif untuk melibatkan diri dalam pembentukan pokmas dan berbagai pengambilan keputusan yang melibatkan kelompok agar kegiatan pokmas dapat lebih efektif.

Dengan demikian mengacu pada kasus pelaksanaan program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas menunjukkan bahwa upaya melakukan pemberdayaan masyarakat miskin dalam program-program pembangunan masih belum memberikan hasil yang optimal. Masyarakat desa terlalu terbiasa menerima dan hanya melaksanakan program-program pembangunan yang bersifat *top-down*. Artinya mereka hanya tinggal melaksanakan program pembangunan, sedangkan bagaimana program tersebut direncanakan menjadi tanggungjawab dari aparat pemerintah. Demikian pula ketika mereka harus melaksanakan program IDT yang

menuntut perlunya keterlibatan secara aktif dari mereka mulai dari perencanaan program sampai pada tingkat pengawasan, banyak diantara mereka yang menjadi bingung. Oleh karena itu adanya intervensi dari aparat desa dalam setiap tahap pelaksanaan program menjadi pilihan terbaik bagi mereka.

2. Evaluasi Proses Pelaksanaan Program IDT

Tahapan kegiatan program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas pada dasarnya telah dilaksanakan mengikuti mekanisme program seperti yang ditetapkan oleh pembuat program. Tahapan itu meliputi kegiatan pembentukan pokmas, kegiatan pemilihan jenis usaha serta kegiatan pendampingan.

Selama tiga tahun pelaksanaan program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas, telah diterimakan kepada 27.000 KK penduduk miskin yang berada di desa tertinggal. Mereka terdistribusi ke dalam 1.141 pokmas.

Pada tahun pelaksanaan program IDT 1994/1995, telah diterimakan pada 72 desa tertinggal dengan jumlah penerima program sebanyak 17.599 KK yang tergabung ke dalam 733 pokmas dengan jumlah pendamping program sebanyak 543 orang.

Pada tahun pelaksanaan program IDT 1995/1996, telah diterimakan di 73 desa tertinggal dengan jumlah penerima program sebanyak 16.053 KK yang terdiri dari 9.236 KK merupakan penerima program pada pelaksanaan tahun sebelumnya dan sebanyak 6.817 KK merupakan penerima program pertama kali. Mereka tersebar ke dalam 715 pokmas yang terdiri dari 426

pokmas lama dan 289 merupakan pokmas baru. Sedangkan jumlah pendamping program pada pelaksanaan tahun 1995/1996 ada sebanyak 515 orang.

Pada tahun pelaksanaan program IDT 1996/1997, telah diterimakan di 73 desa tertinggal dengan jumlah penerima program sebanyak 14.793 KK, terdiri dari 12.209 KK merupakan penerima program pada tahun sebelumnya dan sebanyak 2.584 KK merupakan penerima program pertama kali. Dari sejumlah 14.793 KK penerima program pada pelaksanaan tahun 1996/1997 mereka tersebar kedalam 752 pokmas, dimana sebanyak 633 pokmas merupakan pokmas lama dan sebanyak 119 pokmas merupakan pokmas baru. Sedangkan jumlah pendamping program pada tahun tersebut ada sebanyak 510 orang.

Dalam tiga tahun pelaksanaan program IDT, kegiatan yang dipilih oleh anggota pokmas terbagi kedalam beberapa jenis usaha meliputi: (1) Bidang pertanian yang terdiri dari kegiatan pemeliharaan kambing/domba, pemeliharaan itik, ayam, sapi, kerbau, perikanan, dan tanaman semusim. (2) Bidang perdagangan. (3) Bidang industri/kerajinan. (4) Bidang jasa. Selama tiga tahun pelaksanaan program IDT telah menyerap dana sebanyak Rp.4.360.000.000,00.

2.1. Proses kegiatan pendampingan

Dalam rangka untuk ikut mengentaskan kemiskinan melalui program IDT, pendamping memiliki peranan yang sangat strategis untuk membantu keberhasilan program tersebut. Karena tugas utama pendamping adalah membantu proses pengelolaan

kegiatan kelompok mulai dari penyusunan usulan kegiatan sampai dengan pengawasan dan pengembangan usaha, juga melaksanakan pembinaan dan pengguliran dana dan mengupayakan peningkatan produksi serta pemasaran hasil anggota kelompok sehingga dapat menghasilkan peningkatan pendapatan anggota.

Dalam buku panduan mengenai program IDT, antara lain disebutkan bahwa:

1. Pendamping adalah seseorang yang telah ditunjuk oleh Camat, yang bertugas untuk membina secara teknis pada penduduk miskin/kurang beruntung yang tergabung dalam kelompok masyarakat.
2. Tenaga pendamping sangat diperlukan mengingat penduduk miskin/kurang beruntung pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya.
3. Di dalam proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok, pendamping berfungsi sebagai fasilitator, komunikator ataupun dinamisator.
4. Ruang lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dari para anggota dan pengurus kelompok, peningkatan kemampuan penyelenggaraan kelompok dan peningkatan kemampuan usaha anggota.

Untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi peranan pendamping dalam ikut membantu masyarakat mengelola program IDT, penelitian ini berusaha menggali pendapat langsung dari masyarakat penerima bantuan IDT terhadap kegiatan pendampingan tersebut. Diambilnya kelompok masyarakat ini

karena merekalah yang merasakan langsung manfaat dari keberadaan para pendamping.

Dari kuesioner yang diajukan kepada para responden untuk mengetahui bagaimana fungsi pendamping IDT dalam pelaksanaan program yaitu; **pertama** responden diminta untuk menilai peranan pendamping tentang pemahaman pendamping dalam permasalahan pengentasan kemiskinan. Asumsinya adalah apabila pendamping memahami program pengentasan kemiskinan, dalam hal ini program IDT maka akan mudah bagi pendamping untuk memotivasi masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. sebaliknya, apabila pendamping itu sendiri tidak memahami persoalan dalam pengentasan kemiskinan maka sulit bagi pendamping untuk memberikan penjelasan program kepada kelompok sasaran. **Kedua**, upaya pendamping di dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh penerima program IDT dalam melakukan kegiatan usahanya.

Tabel 11. Persepsi Responden Terhadap Pemahaman Pendamping Dalam Permasalahan Pengentasan Kemiskinan

No.	Pemahaman Pendamping Dalam Pengentasan Kemiskinan	Frekuensi	%
1.	Tidak Memahami	2	2,67
2.	Kurang Memahami	10	13,33
3.	Cukup Memahami	43	57,33
4.	Sangat Memahami	20	26,67
Jumlah		75	100,00

Sumber: Data Primer.

Dari tabel di atas terlihat bahwa menurut 57,33 persen responden, menganggap pendamping "cukup memahami" permasalahan pengentasan kemiskinan. Di samping itu responden yang menyatakan pendamping "sangat memahami" permasalahan pengentasan kemiskinan sebanyak 26,67 persen, dan hanya 16 persen saja yang menyatakan bahwa pendamping "kurang memahami" serta "tidak memahami" persoalan pengentasan kemiskinan. Tingginya prosentase responden yang menganggap bahwa pendamping "sangat memahami" dan "cukup memahami" permasalahan pengentasan kemiskinan menunjukkan bahwa pendamping memiliki citra yang positif dari masyarakat khususnya para penerima program IDT.

Di samping pemahaman permasalahan kemiskinan dari para pendamping yang cukup baik, kesadaran dari para pendamping untuk senantiasa membantu kesulitan para anggota pokmas yang dihadapi berkaitan dengan masalah pelaksanaan program juga sangat berperan terhadap efektivitas program. Tabel berikut akan menjelaskan kondisi tersebut.

Tabel 12 Persepsi Responden Terhadap Peran Pendamping Dalam Membantu Menghadapi Kesulitan Anggota Pokmas

No.	Peranan Pendamping Dalam Membantu Menghadapi Kesulitan	frekuensi	%
1.	Tidak Membantu	3	4
2.	Kurang Membantu	9	12
3.	Cukup membantu	39	52
4.	Sangat Membantu	24	32
Jumlah		75	100

Sumber: Data Primer.

Dari 75 responden yang diteliti, 52 persen responden, menganggap pendamping "cukup membantu" apabila ada anggota pokmas yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan program IDT. Demikian pula responden yang menyatakan pendamping "sangat membantu" juga cukup banyak, yaitu sebanyak 32 persen. Sedangkan responden yang mengatakan bahwa pendamping "kurang/tidak membantu" permasalahan yang dihadapi anggota pokmas hanya ada sebanyak 16 persen.

Namun demikian kesediaan pendamping untuk selalu membantu setiap kesulitan yang dihadapi oleh anggota pokmas dalam melaksanakan program IDT tidak secara otomatis memecahkan permasalahan yang dihadapi, karena kemampuan pendamping tidak selalu pas dengan setiap permasalahan yang oleh anggota pokmas. Tabel di bawah menggambarkan peranan pendamping terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh para anggota pokmas.

Tabel 13. Persepsi Responden Terhadap Peranan Pendamping Dalam Melakukan Kegiatan Pendampingan

Jenis Kegiatan	Sangat Membantu (%)	Cukup Membantu (%)	Kurang Membantu (%)	Jumlah (%)
1. Penyusunan usulan kegiatan	33 (44)	26 (34,67)	16 (21,33)	75 (100%)
2. Pengembangan usaha + Peningkatan prod.	42 (56)	32 (42,67)	1 (1,33)	75 (100%)
3. Pengguliran dana	55 (73,33)	20 (26,67)	-	75 (100%)
4. Pemasaran hasil produksi	8 (10,67)	11 (14,67)	56 (74,66)	75 (100%)

Sumber: Data Primer.

Dari tabel di atas terlihat bahwa kegiatan pendampingan yang memberikan peran "sangat membantu" anggota pokmas adalah pada kegiatan penyusunan usulan kegiatan, kegiatan pengembangan usaha dan peningkatan produksi serta pengguliran dana. Namun demikian dari ketiga kegiatan pendampingan tersebut, kegiatan pendampingan dalam bidang pengguliran dana menunjukkan prosentase paling menonjol. Sebaliknya pendampingan dalam kegiatan pemasaran hasil produksi prosentase terbesar responden menjawab bahwa pendamping justru "kurang membantu". Hasil tersebut berbicara makna bahwa pendamping memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memberikan pendampingan pada kegiatan penyusunan usulan kegiatan, kegiatan pengembangan usaha, peningkatan produksi, dan kegiatan pengguliran dana. Sedangkan pendampingan pada kegiatan pemasaran hasil produksi, pendamping tidak memiliki kemampuan yang memadai.

Sebenarnya kondisi kemampuan pendamping yang seperti ini tidak menjadi masalah ketika program IDT baru dilaksanakan pada tahap-tahap awal. Tetapi apabila kegiatan usaha kelompok dari anggota pokmas penerima program IDT telah memasuki tahap pengembangan, adanya kualitas pendamping yang demikian akan menjadi penghambat pengembangan usaha kelompok, karena permasalahan yang dihadapi kelompok tidak lagi hanya berkisar pada bagaimana membuat usulan kegiatan yang baik, melakukan peningkatan produksi serta melakukan pengguliran dana dengan tertib tetapi lebih dari itu kegiatan pemasaran hasil produksi harus mendapat porsi utama.

Dari hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa adanya kemampuan pendamping yang seperti itu lebih disebabkan karena pemilihan seseorang menjadi pendamping lebih ditekankan pada unsur "ketokohan" dari orang tersebut dalam masyarakat, dan bukannya ditekankan pada unsur "kemampuan teknis" yang harus dimiliki dalam kegiatan pendampingan. Para pendamping lapangan dari kegiatan IDT ini pada umumnya didominasi oleh para guru sekolah dasar dan para perangkat desa. Kedua profesi ini memang sangat dihormati dan menjadi tokoh panutan bagi sebagian besar masyarakat di pedesaan. Akibat lebih lanjut dari penekanan unsur "ketokohan" adalah bahwa sebenarnya para tokoh masyarakat ini telah memiliki banyak kegiatan, sehingga kegiatan pendampingan yang dibebankan kepada mereka hanya dianggap sebagai kegiatan sampingan, akibatnya frekuensi pendampingan menjadi sangat rendah.

2.2. Proses pembentukan pokmas

Kelompok masyarakat (Pokmas) mempunyai peranan penting terhadap efektifitas pemanfaatan program IDT. Tanpa terbentuknya pokmas maka dana IDT tidak akan dapat digulirkan dan dimanfaatkan. Menurut buku panduan pelaksanaan program IDT, pokmas dalam program IDT adalah penduduk miskin, yang bermukim di Desa/Kelurahan yang dikategorikan tertinggal dan mereka merupakan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan terbatas kemampuannya, baik dalam hal permodalan atau menghadapi masalah khusus dan mendesak yang memerlukan

segera penanganan dan bantuan, maupun dalam hal mendapatkan pelayanan dan prasarana.

Secara rinci, pengertian kelompok mengandung beberapa makna sebagai berikut:

1. Kelompok merupakan kumpulan penduduk setempat yang menyatukan diri dalam usaha dibidang sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, keswadayaan dan kegotongroyongan mereka.
2. Kelompok beranggotakan sekitar tigapuluh kepala keluarga (KK) yang berada di Desa/Kelurahan atau di bawah tingkat Desa/Kelurahan, yakni dusun, lingkungan RW atau RT;
3. Dalam satu Desa/Kelurahan dapat tumbuh beberapa kelompok sesuai kebutuhan;
4. Kelompok dapat tumbuh dari kelompok tradisional yang telah ada seperti kelompok arisan, kelompok akseptor KB, dan lain-lain. Apabila belum ada kelompok seperti itu maka perlu segera dibentuk/ditumbuhkan dan dibina secara khusus.

Tujuan dari pembentukan kelompok tersebut adalah sebagai wadah dari pokmas program IDT untuk memperlancar penanggulangan kemiskinan, sekaligus agar pelayanan terhadap penduduk miskin terarah, hubungan timbal-balik dapat ditingkatkan, dan kesetiakawanan serta kegotongroyongan dapat dikembangkan.

Apabila mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Program IDT, maka proses pembentukan pokmas yang baik adalah apabila dilakukan secara demokratis-partisipatif. Namun demikian

hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa keterlibatan aparat desa dalam proses pembentukan pokmas terlihat cukup tinggi. Namun apabila dilihat dari segi efektivitasnya, kegiatan pokmas ini dapat dikatakan cukup baik. Kondisi ini sesuai dengan hasil analisis statistik di atas bahwa ada korelasi negatif antara proses pembentukan pokmas dengan tingkat kenaikan penghasilan anggota pokmas. Artinya semakin tinggi keterlibatan aparat desa dalam proses pembentukan pokmas kegiatan pokmas justru semakin efektif. Keadaan ini berakibat pada semakin meningkatnya prosentase penghasilan dari anggota pokmas itu sendiri.

Tingginya keterlibatan aparat desa dalam proses pembentukan pokmas dapat terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 14. Penentuan Keanggotaan Pokmas

No.	Keanggotaan Pokmas ditentukan oleh Aparat Desa	frekuensi	%
1.	Ya	61	81,33
2.	Tidak	14	18,67
	Jumlah	75	100,00

Sumber: Data Primer.

Dari tampilan tabel di atas terlihat bahwa 81,33 persen responden menyatakan bahwa perekrutan mereka dalam keanggotaan pokmas ditentukan oleh aparat desa dan hanya 18,67 persen yang menyatakan bahwa keanggotaan mereka dalam pokmas tidak ditentukan oleh aparat desa. Namun demikian meskipun

keanggotaan mereka dalam pokmas sangat ditentukan oleh aparat desa, sikap mereka atas perlakuan ini justru sangat mendukung seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Sikap Masyarakat Penerima IDT Terhadap Keanggotaan Pokmas Yang Ditentukan Oleh Aparat Desa

No.	Sikap Masyarakat thd Keanggotaan Pokmas yang ditentukan Aparat Desa	Frekuensi	%
1.	Sangat Setuju	15	20
2.	Setuju	42	56
3.	Kurang Setuju	8	10,67
4.	Tidak Setuju	10	13,33
Jumlah		75	100,00

Sumber: Data Primer.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 76 persen responden menyatakan setuju/sangat setuju terhadap keanggotaan pokmas yang ditentukan oleh aparat, dan hanya 24 persen saja yang menyatakan kurang setuju/tidak setuju terhadap keterlibatan aparat desa dalam penentuan anggota pokmas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian masyarakat miskin di pedesaan terhadap kebebasan menentukan nasib mereka sendiri dalam upaya memerangi kemiskinan masih sangat rendah. Sikap apatis itu ditunjukkan dengan penerimaan mereka terhadap anggota pokmas yang sebenarnya "tidak masuk kategori miskin". Mereka merasa tidak dirugikan dengan masuknya orang-orang yang sebenarnya tidak berhak sebagai anggota pokmas. Mereka memiliki prinsip bahwa "rejeke orang itu sudah ada yang mengatur".

mereka yang setuju apabila keanggotaan dalam pokmas ditentukan oleh perangkat desa dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Anggapan bahwa aparat desa lebih mengetahui kemampuan dan seluk beluk masing-masing warganya.
2. Agar lebih teratur dan mudah diarahkan
3. Adanya anggapan bahwa hal itu memang merupakan wewenang aparat desa untuk mengatur, sesuai dengan petunjuk dari pamong desa yang ada, sehingga warga menganggap memang begitulah aturannya.
4. Hasil keputusan bahwa aparat yang sebaiknya menentukan.

Sedangkan alasan dari mereka yang kurang/tidak setuju kalau aparat desa yang menentukan keanggotaan pokmas adalah:

1. Menurut mereka kalau memilih sendiri bisa mencari orang yang jenis kegiatannya sama sehingga kalau ada penyuluhan bisa lebih efektif.
2. Tidak bisa memilih kelompok dengan bebas.
3. Kekhawatiran jarak tempat tinggal antar anggota berjauhan.

Dari alasan mereka yang setuju, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah adanya pandangan bahwa penentuan pokmas merupakan wewenang aparat Desa. Pandangan ini menguatkan argumentasi bahwa sebenarnya masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Banyumas tidak siap mengelola program pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan dirinya, sehingga mereka menjadi pasif untuk berinisiatif serta kurang mandiri.

Hasil perolehan data dilapangan juga menunjukkan bahwa fungsi pokmas sebagai "wadah kebersamaan" untuk mengelola kegiatan sosial ekonomi anggota belum tercipta. dari kondisi yang dapat terpantau, fungsi pokmas nampaknya baru terbatas sebagai "tempat" untuk mendistribusikan dana program. Peranan pokmas menjadi sangat penting hanya pada saat pencairan dana program. Disamping itu kegiatan rutin pokmas yang dilakukan baru terbatas pada kegiatan pengelolaan pengembalian dana program dari anggota kepada kelompok untuk kepentingan pengkuliran dana. Sedangkan kegiatan usaha dari anggota lebih banyak dilakukan secara sendiri-sendiri.

Dari hasil penelitian juga diperoleh data bahwa sebagian dari penerima program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas sebenarnya tidak termasuk penduduk miskin. Kebanyakan diantara mereka adalah para perangkat desa. Ketika masalah ini dikonfirmasi kepada mereka, dijelaskan bahwa keterlibatan mereka sebagai anggota pokmas tidak disebabkan karena interest terhadap dana program melainkan lebih disebabkan karena keinginan mereka untuk melakukan pembinaan langsung terhadap kegiatan anggota pokmas. Dengan alasan karena mereka harus bertanggungjawab terhadap keberhasilan program di tingkat desa mereka menjadi merasa perlu untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan program IDT.

2.3. Proses Pemilihan Jenis Usaha

Evaluasi terhadap pemilihan jenis usaha dimaksudkan untuk melihat sejauhmana ketepatan pemilihan jenis usaha

memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Mengacu pada petunjuk yang ada dalam buku pedoman program IDT, pemilihan jenis usaha yang sebaiknya dikembangkan adalah jenis usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Cepat menghasilkan, yaitu jarak waktu antara pengeluaran yang harus dilakukan dengan penerimaan hasil kegiatan tidak terlalu lama.
2. Mendayagunakan potensi yang ada dan dimiliki oleh desa/kelurahan.
3. Menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau memenuhi permintaan pasar sehingga dapat memberikan nilai tambah.
4. Dapat memenuhi kebutuhan dasar yang sifatnya mendesak dan melibatkan sebanyak-banyaknya penduduk yang kurang beruntung.
5. Memberikan hasil dan dapat digulirkan pada seluruh anggota kelompok.
6. dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah dikenal dan dikuasai oleh masyarakat dengan memanfaatkan pengetahuan asli yang telah ada dan secara teknis dapat dan mudah dilaksanakan.
7. disesuaikan dengan potensi dan kondisi ekologis sehingga tidak merusak kelestarian lingkungan hidup.
8. saling mendukung dan tidak bersaing dengan kegiatan lain yang dilaksanakan melalui program pembangunan sektoral dan regional.
9. secara sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat.

Pelaksanaan program IDT di Kabupaten Banyumas telah berjalan selama tiga tahun anggaran yaitu sejak tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 1996/1997. Untuk mempermudah pemantauan dari program IDT ini, pelaporan perkembangannya dibuat per tahun pelaksanaan anggaran. Berikut ini adalah gambaran mengenai perkembangan jenis usaha untuk masing-masing tahun pelaksanaan program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas sejak tahun 1994 sampai dengan 1996.

1. Program IDT Tahun Pelaksanaan 1994/1995

Tabel 16. Perkembangan Program IDT Tahun Pelaksanaan 1994/1995 Per Desember 1997

JENIS KEGIATAN	PERKEMBANGAN									
	FISIK				KEUANGAN (Rp)				JUMLAH	
	Awal	Skr	Naik	%	Awal	Sekarang	Naik	%	KK	%
A. PERTANIAN										
- Kambing/Domba	9.143	19.447	10.304	112,7	759.703.990	1.256.515.500	496.811.510	65,4	9.143	52,8
- Ayan	9.255	14.760	5.505	59,0	81.569.025	114.680.900	33.111.875	40,6	1.933	5,7
- Itik	203	515	-	-	1.799.000	2.442.000	643.000	35,7	151	0,1
- Sapi	129	127	-	-	54.940.000	80.600.000	25.660.000	46,7	218	3,8
- Kerbau	10	10	-	-	1.850.000	3.850.000	2.000.000	108,1	10	0,1
- Perikanan	-	-	-	-	88.732.505	122.454.000	33.721.495	38,0	1.524	6,2
- Tan. Semusim	-	-	-	-	44.260.500	91.568.200	47.307.700	106,9	619	3,1
Jumlah					1.032.855.020	1.672.110.600	639.255.580	61,9	13.598	71,7
B. PERDAGANGAN	-	-	-	-	268.092.330	488.360.700	220.268.370	82,2	2.557	18,6
C. INDUSTRI	-	-	-	-	56.203.000	83.344.600	27.141.6000	48,3	662	3,9
D. JASA	-	-	-	-	82.849.650	129.699.200	46.849.550	56,5	782	5,8
JUNJAH TOTAL	-	-	-	-	1.440.000.000	2.373.515.100	933.515.100	64,8	17.599	100

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas Tahun 1997

Keseluruhan dana IDT tahun pelaksanaan 1994/1995 berjumlah Rp. 1.440.000.000,00. Bidang pertanian adalah bidang usaha yang paling banyak melibatkan anggota pokmas, terbukti

dalam bidang ini terserap 13.598 KK atau 71,7 persen dari seluruh anggota pokmas. Penyerapan untuk bidang-bidang yang lain bisa disebutkan masing-masing bidang perdagangan 18,6 persen, bidang industri 3,9 persen dan bidang jasa 5,8 persen. Gambaran ini bisa disimak pada tabel 17, 18 dan 19 di atas.

Tingginya anggota pokmas di bidang pertanian ini lebih dimungkinkan, karena latar belakang kelompok sasaran yang pada umumnya adalah para petani. Adapun jenis usaha yang paling banyak dipilih oleh anggota pokmas adalah ternak kambing/domba yang tercatat ditekuni oleh 9.143 KK atau 52,8 persen. Hal ini disebabkan karena mudahnya pemeliharaan, serta resiko kematian yang cukup rendah, telah menyebabkan jenis usaha ini dijadikan alternatif pilihan. Pemeliharaan ternak kambing, memang merupakan suatu kegiatan yang sebenarnya telah cukup dikenal oleh masyarakat petani di pedesaan. Pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki inilah yang menyebabkan mereka yang memilih jenis kegiatan ternak kambing tidak perlu penyesuaian-penyesuaian lagi.

2. Program IDT Tahun Pelaksanaan 1995/1996

Perkembangan program IDT tahun pelaksanaan 1995/1996 selama dua tahun anggaran sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Perkembangan Pelaksanaan Program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas pada Tahun Anggaran 1995/1996 Per Desember 1997.

JENIS KEGIATAN	PERKEMBANGAN									
	FISIK				KEUANGAN (Rp)				JUMLAH	
	Awal	Skr	Naik	%	Awal	Sekarang	Naik	%	KK	%
A. PERTANIAN										
- Kambing/Donba	8.694	9.987	1.293	14,9	871.128.790	1.140.625.500	269.496.710	30,9	8.694	59,7
- Ayam	8.470	10.491	2.021	23,9	69.636.825	95.615.000	25.378.175	37,3	847	4,8
- Itik	108	108	-	-	1.350.000	1.581.000	231.000	17,1	7	0,1
- Sapi	205	205	-	-	72.407.000	89.044.000	16.637.000	23,0	205	5,0
- Kerbau	1	1	-	-	550.000	775.000	225.000	40,9	1	0,0
- Perikanan	-	-	-	-	62.807.655	85.516.300	22.708.645	36,2	742	4,3
- Tan. Seausim	-	-	-	-	72.029.900	112.307.000	40.277.100	55,9	866	4,9
Jumlah	-	-	-	-	1.149.910.170	1.525.463.800	375.553.630	32,7	11.362	78,8
B. PERDAGANGAN	-	-	-	-	211.034.130	300.213.900	89.179.770	42,3	3.810	14,5
C. INDUSTRI	-	-	-	-	43.105.000	84.220.000	41.115.000	95,4	508	3,0
D. JASA	-	-	-	-	55.950.700	80.958.000	25.007.300	44,7	373	3,8
JUMLAH TOTAL	-	-	-	-	1.460.000.000	1.999.811.700	530.851.700	36,4	16.053	100

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas tahun 1997.

Apabila dibandingkan dengan tahun pelaksanaan program IDT 1994/1995, pelaksanaan program IDT 1995/1996 sebenarnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Dalam arti komposisi bidang-bidang yang ditekuni anggota pokmas masih didominasi oleh bidang pertanian yaitu 78,8 persen, perdagangan 14,5 persen, bidang industri 3,0 persen dan bidang jasa 3,8 persen. Meskipun demikian untuk bidang pertanian, ternyata mengalami peningkatan dalam menyerap anggota pokmas, karena pada tahun sebelumnya hanya 71,7 persen. Sementara itu untuk bidang-bidang yang lain ternyata mengalami penurunan karena masing-masing bidang sebelumnya lebih tinggi prosentasenya seperti bidang perdagangan 18,6 persen, bidang industri 3,9 persen dan bidang jasa 5,8 persen.

Secara umum, jumlah dana IDT tahun pelaksanaan 1995/1996 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya

yaitu Rp 1.460.000.000,00, sementara tahun pelaksanaan 1994/1995 sebesar Rp 1.440.000.000,00. Kenaikan ini disebabkan karena pada tahun anggaran 1995/1996 ada penambahan satu desa tertinggal yaitu Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh.

3. Program IDT Tahun Pelaksanaan 1996/1997

Perkembangan program IDT tahun pelaksanaan 1996/1997 selama satu tahun anggaran dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 18. Perkembangan Pelaksanaan Program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas pada Tahun Anggaran 1996/1997 Per Desember 1997.

JENIS KEGIATAN	PERKEMBANGAN									
	FISIK				KEUANGAN (Rp)				JUMLAH	
	Awal	Skr	Naik	%	Awal	Sekarang	Naik	%	KK	%
A. PERTANIAN										
- Kambing/Domba	8.378	8.424	46	0,5	796.508.150	826.660.800	29.152.650	3,7	8.378	54,6
- Ayam	2.793	2.977	84	3,0	15.127.700	15.232.700	105.000	0,7	216	1,0
- Itik	1.375	1.375	-	-	3.403.950	3.564.000	160.650	4,7	72	0,2
- Sapi	247	247	-	-	191.549.000	193.099.000	1.550.000	0,8	2.236	13,6
- Kerbau	4	4	-	-	1.750.000	1.850.000	100.000	5,7	24	0,1
- Perikanan	-	-	-	-	58.752.800	58.776.800	24.000	0,0	567	4,0
- Tan. Semusim	-	-	-	-	72.481.750	87.428.900	14.947.150	20,6	609	5,0
Jumlah	-	-	-	-	1.139.573.350	1.185.612.200	46.038.850	4,0	12.102	78,1
B. PERDAGANGAN	-	-	-	-	227.361.550	247.749.000	20.387.450	9,0	1.895	15,6
C. INDUSTRI	-	-	-	-	36.108.000	37.068.600	960.600	2,7	230	2,5
D. JASA	-	-	-	-	56.957.100	60.095.400	3.138.300	5,5	566	3,9
JUMLAH TOTAL	-	-	-	-	1.460.000.000	1.530.525.200	70.525.200	4,8	14.793	100,0

Sumber: Laporan Pelaksanaan Program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas, 1997.

Komposisi Jenis usaha dalam pelaksanaan IDT tahun 1996/1997 tidak banyak mengalami perubahan. Keseluruhan dana

IDT pelaksanaan tahun 1996/1997 sebesar Rp. 1.460.000.000,00. Jumlah ini sama dengan dana program IDT pada pelaksanaan tahun 1995/1996. Berdasarkan jenis kegiatannya, bidang pertanian masih tetap paling banyak melibatkan anggota pokmas yaitu 12.102 KK atau 78,1 persen. Gambaran ini bisa disimak pada tabel 22 di atas.

Pelaksanaan IDT 1996/1997 memperlihatkan bahwa jenis kegiatan ternak kambing masih tetap paling diminati anggota pokmas terbukti terdapat 8.378 KK atau 54,6 persen menggeluti kegiatan ini. Jenis kegiatan ternak sapi ternyata semakin banyak dipilih anggota pokmas. Bahkan untuk pelaksanaan tahun 1996/1997 jumlahnya 2.233 KK atau 13,1 persen. melebihi tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar 5 persen saja. Sementara itu bagi petani memelihara ternak sapi dipandang lebih mudah karena pemberian pakan dan perawatannya tidak terlampau menyulitkan seperti halnya pada ternak kambing.

Kalau kita perhatikan selama tiga tahun pelaksanaan program IDT di Kabupaten Banyumas, jenis usaha pertanian khususnya ternak kambing menjadi pilihan utama dari para anggota pokmas. Pemilihan atas jenis usaha tertentu, menurut sebagian besar anggota pokmas lebih karena ingin mengembangkan usaha sesuai dengan kemampuannya. Oleh sebab itu sangat wajar seandainya bidang pertanian khususnya ternak kambing menjadi pilihan utama anggota pokmas karena latar belakang mereka yang pada umumnya berbasis petani. Dari hasil penelitian diketahui bahwa alasan pemilihan jenis usaha dari anggota pokmas adalah sebagai berikut.

Tabel 19. Alasan Pemilihan Jenis Usaha

No.	Alasan Pemilihan Jenis Usaha	Frekuensi	%
1.	Ditentukan oleh aparat	14	18,67
2.	Untuk Mengurangi resiko kegagalan	43	57,33
3.	Sesuai dengan kemampuan	18	24
	Jumlah	75	100

Sumber: Data Primer.

Dari data di atas terlihat bahwa dari 75 responden yang diteliti sebanyak 24 persen memilih jenis usaha yang dianggap "sesuai dengan kemampuannya" tentu saja mengingat sebagian besar latar belakang pekerjaan mereka adalah petani, maka usaha pertanian yang mereka pilih. Dalam bidang pertanian ini, sebagian besar usaha ternak menjadi pilihan karena ternak bagi mereka merupakan "aset kekayaan" yang dapat dijual sewaktu-waktu apabila kondisi ekonomi mendesak. Dengan demikian memelihara ternak lebih didasarkan atas keinginan untuk "menabung" dari pada untuk mengembangkan usaha. Sikap ini sebenarnya telah menyimpang dari filosofi program IDT yang berkeinginan untuk mengentaskan penduduk miskin dari jurang kemelaratan melalui kegiatan pengembangan usaha. Dimana dalam buku pedoman program IDT disebutkan bahwa setiap anggota pokmas agar memilih jenis kegiatan yang cepat menghasilkan dan memberikan banyak keuntungan.

Alasan kedua yang banyak dikemukakan dalam melakukan pilihan terhadap jenis usaha yang diambil adalah alasan "mengurangi resiko kegagalan", yang dilakukan oleh 57,33

persen responden . Hal ini bisa dipahami karena kebanyakan perilaku ekonomi petani di pedesaan didasarkan atas etika *subsisten* (Scott, 1994), yaitu perilaku kehidupan yang didasarkan atas kondisi sikap mental "asal sekedar bisa hidup". Orang yang memiliki mental seperti ini memiliki semboyan "dahulukan selamat". Mereka tidak pernah berfikir untuk mengembangkan usaha, karena setiap upaya pengembangan usaha selalu mengandung resiko kegagalan. Dari penggalan data melalui metode wawancara, banyak responden ketika ditanya "apakah ternak kambing yang diperoleh akan dipelihara sampai berkembang menjadi banyak". Sebagian besar dari mereka mengatakan "tidak", dengan alasan apabila berkembang menjadi banyak mereka tidak akan mampu untuk memeliharanya. Mereka sama sekali tidak pernah berfikir bahwa mereka dapat merubah kehidupan mereka dari seorang petani miskin yang hanya memiliki beberapa ekor kambing yang menjadi kekayaannya, menjadi seorang petani kaya yang memiliki peternakan kambing sebagai andalan penghidupannya.

Banyak kasus terjadi sebelum mereka menerima dana IDT. sebenarnya mereka telah memiliki ternak kambing tetapi begitu mereka mendapat dana IDT yang dialokasikan untuk kegiatan ternak kambing, kambing milik sendiri langsung mereka jual. Kondisi ini sebenarnya menggambarkan bahwa mereka tidak memiliki jiwa wiraswasta. Padahal semangat ini menjadi kunci pokok keberhasilan pelaksanaan program IDT. Pada kasus ini sebenarnya dapat dilakukan suatu analisis bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang

oleh faktor ekonomi semata-mata tidaklah tepat. Karena beberapa kasus menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan karena faktor budaya, disamping juga pengaruh beberapa faktor yang lainnya.

Cukup menarik pula untuk diamati bahwa salah satu alasan mereka memilih jenis usaha karena "ditentukan oleh aparat". Jawaban ini diberikan oleh 18,67 persen responden. Hal ini memberikan bukti bahwa sikap kemandirian akan rasa tanggungjawab terhadap pemecahan masalah yang dimiliki oleh mereka dan harus dihadapi oleh mereka sendiri masih kurang. Temuan ini mendukung analisis statistik di muka yang diperoleh hasil bahwa keterlibatan perangkat desa terhadap pembentukan kelompok masyarakat justru lebih diharapkan oleh para anggotanya.

3. Dampak Pelaksanaan Program IDT Terhadap Peningkatan Pendapatan Penduduk Miskin

Tujuan secara umum program IDT adalah untuk mempercepat upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dan jumlah Desa/Kelurahan tertinggal, sehingga pada gilirannya dapat mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kondisi sosial ekonomi penduduk miskin, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Program yang pelaksanaannya di dasarkan pada Inpres No 5 Tahun 1993 ini, pada dasarnya masih merupakan program yang baru, karena baru diberlakukan pada tahun anggaran 1994/1995.

Namun demikian meskipun ada peningkatan pendapatan, untuk dapat mengatakan bahwa mereka telah terentaskan dari kemiskinan diperlukan sikap kehati-hatian, mengingat standar kemiskinan yang digunakan juga selalu mengalami perubahan/penyesuaian dengan keadaan.

Pada tahun 1993 saat program IDT mulai dicetuskan, batas yang digunakan untuk mengkategorikan seseorang berada dalam batas minimal garis kemiskinan adalah apabila pendapatan perkapita per bulan sebesar Rp 19.278,00 untuk daerah pedesaan dan sebesar Rp 27.475,00 untuk daerah perkotaan.

Pada tahun 1997 ini menurut hasil SUSENAS tahun 1996, batas yang digunakan untuk mengkategorikan seseorang berada pada batas minimal garis kemiskinan adalah pendapatan perkapita per bulan sebesar Rp 30.246,00 untuk daerah perkotaan dan Rp 27.413,00 untuk daerah pedesaan. Batasan ini setara dengan kebutuhan konsumsi rata-rata 2.100 Kalori makanan perkapita per hari, ditambah rata-rata pengeluaran non-makanan per kapita per bulan. Kebutuhan non-makanan ini meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, sandang, kesehatan, transport, dan kebutuhan minimum non-makanan lain.

Pada tahun 1998 setelah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, Biro Pusat statistik melakukan penghitungan ulang untuk mengelompokkan seseorang masuk dalam kategori miskin atau tidak diukur dari penghasilan perkapita perbulan sebesar Rp. 52.470,00 untuk daerah perkotaan dan sebesar Rp. 41.588,00 untuk daerah pedesaan.

kemiskinan yang bersifat nasional, dimana indikator kemiskinan yang digunakan bersifat nasional pula seperti penentuan batas garis kemiskinan yang sama untuk seluruh daerah di Indonesia, maka dalam penelitian ini penentuan batas garis kemiskinan yang digunakan sebagai acuan dalam analisis adalah menggunakan batasan terbaru yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik yaitu garis batas kemiskinan untuk daerah pedesaan ditetapkan sebesar Rp 41.558,00 per kapita perbulan.

Mengingat telah terjadi kenaikan ambang batas garis kemiskinan secara cepat maka penelitian ini tidak bermaksud secara kaku untuk menyimpulkan apakah pelaksanaan program IDT di Kabupaten Banyumas selama tiga tahun anggaran sejak tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 1996\1997 telah dapat mengentaskan penduduk miskin penerima program tersebut atau belum. Penelitian ini lebih diarahkan untuk mengetahui apakah program IDT dapat meningkatkan penghasilan penduduk miskin penerima program tersebut. Apabila ada peningkatan penghasilan dari para penduduk miskin penerima program IDT setidaknya dapat dijadikan indikator bahwa hasil program IDT telah mengarah pada tujuan yang benar.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa pelaksanaan program IDT di kabupaten banyumas secara umum telah dapat meningkatkan penghasilan penduduk miskin penerima program. Namun demikian kenaikan penghasilan tersebut belum dapat mengentaskan mereka dari kemiskinan yang disandangnya. Tabel

berikut akan menjelaskan temuan data tersebut.

Tabel 20. Rata-Rata Income Percapita Penerima Program IDT Sebelum dan Sesudah Program

Rata-Rata Income Percapita		Rata-rata Prosentase Kenaikan Income Per-capita
Sebelum Program	Sesudah Program	
22.574	29.922	25,43

Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata income percapita penduduk miskin sebelum menerima program IDT hanya sebesar Rp. 22.574,00 dan sesudah mereka menerima program IDT rata-rata income perkapitanya meningkat menjadi Rp. 29.922,00 atau meningkat sebesar 25,43 persen (tabel frekuensi income percapita dari 75 responden dapat dilihat pada halaman lampiran). Dari peningkatan income percapita ini ternyata belum dapat mengentaskan mereka dari kemiskinan yang disandangnya. Seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Status Penduduk Sebelum Program

Value Label	Value	Frequency	Percent	Valid Percent	Cum Percent
MISKIN	.00	64	85.3	85.3	85.3
TIDAK MISKIN	1.00	11	14.7	14.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Tabel 22. Status Penduduk Sesudah Program

Value Label	Value	Frequency	Percent	Valid Percent	Cum Percent
MISKIN	.00	63	84.0	84.0	84.0
TIDAK MISKIN	1.00	12	16.0	16.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Dari tabel 21 diketahui bahwa dari 75 responden penerima program IDT, 11 diantaranya atau sebanyak 14,7 persen tidak termasuk kategori penduduk miskin. Dari analisis proses pembentukan pokmas, beberapa orang yang sebenarnya tidak layak untuk mendapat program IDT tetapi menjadi anggota pokmas sebenarnya tidak semata-mata interes terhadap dana program tetapi memang sengaja dimasukkan oleh perangkat desa untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan kelompok.

Dari tabel 20 diketahui bahwa dengan adanya program IDT dapat meningkatkan rata-rata income perkapita penduduk miskin di pedesaan. Namun dari tabel 22 terlihat bahwa meskipun terjadi kenaikan income perkapita dari para penerima program IDT, kenaikan penghasilan tersebut belum dapat mengentaskan mereka dari kemiskinan yang dialaminya. Apabila kita membandingkan antara tabel 21 dengan tabel 22 terlihat bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak miskin hanya terjadi pada 1 orang atau hanya meningkat sebanyak 1,33 persen. Perhitungan kategori miskin pada kondisi sesudah program dengan menggunakan ambang batas kemiskinan terbaru.

4. Kendala Pengelolaan Program IDT

Mengacu pada hasil temuan dilapangan terhadap pelaksanaan program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas, diketahui ada beberapa kendala yang dapat menghambat efektifitas pelaksanaan program IDT. Beberapa kendala tersebut antara lain:

1. Kendala Program

Dalam pelaksanaan program IDT pemerintah sebagai pembuat kebijakan mengasumsikan bahwa timbulnya kemiskinan semata-mata disebabkan karena masalah ekonomi. Terjadinya kemiskinan di pedesaan diasumsikan karena penduduk kekurangan modal usaha. Dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa penyebab kemiskinan tidak semata-mata karena faktor ekonomi tetapi juga faktor budaya. Atas dasar hal tersebut maka pemberian modal usaha kepada penduduk miskin melalui program IDT tidak sepenuhnya memberikan hasil yang optimal karena lebih banyak penduduk pedesaan yang tidak siap mengelola dana program IDT untuk berwiraswasta. Dana program lebih banyak digunakan untuk kegiatan usaha yang secara ekonomis tidak memberikan keuntungan yang maksimal.

2. Kendala dari aparat.

Munculnya kendala ini lebih disebabkan karena ketidakmampuan aparat pelaksana program IDT, terutama dari para pendamping dalam melaksanakan tugas kegiatannya. Hal ini disebabkan karena:

- 1.1. Terbatasnya keahlian para pendamping pada bidang-bidang usaha yang dipilih oleh para anggota pokmas menyebabkan para pendamping tidak mampu memberikan pembinaan secara optimal terhadap kegiatan usaha kelompok.
- 1.2. Berbagai kesibukan yang dialami oleh para pendamping menyebabkan tugas pendampingan hanya dianggap sebagai kegiatan sampingan, akibatnya kegiatan pokmas menjadi kurang terbina.

UNIVERSITAS TERBUKA

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil uji statistik diketahui bahwa variabel peranan pendamping dan variabel pemilihan jenis usaha mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tingkat kenaikan pendapatan penerima program IDT, dengan arah hubungan positif. Variabel pembentukan kelompok masyarakat mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tingkat kenaikan pendapatan penerima program IDT, dengan arah hubungan negatif.
2. Program IDT di Kabupaten Dati II Banyumas dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme program seperti apa yang seharusnya dilakukan. Adapun pelaksanaan program IDT sampai dengan tahun ketiga adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Pada kegiatan pembentukan pokmas keterlibatan perangkat desa terlihat cukup tinggi sehingga tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh pembuat program bahwa kegiatan pembentukan pokmas mestinya lebih menekankan pada aspek demokratisasi. Di samping itu keberadaan pokmas belum dapat menjadi "wadah kebersamaan" untuk mengelola kegiatan sosial ekonomi anggota.

- 2.2. Kegiatan pendampingan belum dapat memberikan hasil yang optimal. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya kemampuan teknis yang dimiliki oleh para pendamping. Hal ini dapat terjadi karena pemilihan dari para pendamping lebih didasarkan atas pertimbangan "ketokohan" dari orang tersebut dan bukannya atas dasar "kemampuan teknik" yang dimiliki oleh mereka.
- 2.3. Pemilihan jenis usaha lebih banyak didominasi oleh jenis usaha ternak kambing, meskipun jenis usaha tersebut kurang memberikan prospek perkembangan usaha yang tinggi jika dibandingkan dengan jenis usaha perdagangan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan atas hasil penelitian ini, rekomendasi yang perlu diberikan kepada pemerintah daerah tingkat II Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan melalui program IDT mestinya tidak hanya sekedar dilakukan melalui pemberian bantuan modal usaha semata-mata, tetapi perlu juga diberikan penyuluhan mengenai kewirausahaan kepada para penduduk miskin khususnya mereka yang berada di pedesaan.
2. Pemilihan jenis usaha dari para anggota pokmas hendaknya diarahkan pada kegiatan yang memberikan prospek pengembangan yang cukup tinggi misalnya sektor perdagangan atau jasa.

3. perlu dilakukan peningkatan kemampuan teknis dari para pendamping mengenai berbagai kegiatan jenis usaha khususnya yang dipilih oleh anggota pokmas yang menjadi bimbingannya.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik, 1995, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta.
- Kantor Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas, 1996, *Laporan Tahunan Pelaksanaan Program IDT di Kabupaten Banyumas*, Purwokerto.
- Kantor Statistik Jawa Tengah, *Garis Kemiskinan Jawa Tengah 1992/1993*, Semarang.
- Langbein, Laura Irwin, 1980, *Discovering Whether Programs Work: A Guide to Statistical Methods for Program Evaluation*, Scott Foresman and Company, Illinois.
- Moeljarto Tjokrowinoto, 1994, *Konsep dan Isue Pembangunan Nasional*, Diktat Program Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- , 1993, *Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan*, Makalah Seminar Bulanan, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1993, *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*, Makalah Seminar "Peranan Iptek Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan", HUT KORPRI ke 22 di Yogyakarta.
- Samodra Wibawa, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. R.G. Persada, Jakarta.
- Sofian Fivendi, *Birokrasi Pembangunan Kualitas Manusia dan Produktivitas Nasional*, dalam Akhmad Zaini Abar (Ed.) 1990, *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*, Ramadhani, Solo.